



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

LKJIP

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la, Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemeintah Tahun 2024 dapat diselesaikan. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik atas amanat dan tanggungjawab kepada Dispermades PPKB.

Tahun anggaran 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026 dalam mendukung capaian RPD masa transisi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan mempedomani RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Dispermades PPKB mendukung tiga dari total 7 tujuan dalam RPD yaitu (1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, (2) Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas serta (3) Meningkatnya kualitas layanan publik.

Laporan kinerja menyajikan informasi atas pelaksanaan kinerja yang terdiri dari sasaran strategis, program, kegiatan dan anggaran sebagaimana tertuang dalam Renstra dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dispermades PPKB juga berperan aktif dalam program dan kebijakan nasional diantaranya berkaitan dengan Dana Desa, Pendampingan BUMDes MA Lkd transformasi eks - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) serta Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana Perpres 72 Tahun 2021.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh seluruh pihak yang telah mendukung tugas dan fungsi Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Banjarnegara, 28 Februari 2025

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun uraian pencapaian sasaran strategis dan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,50	73,95	95,42	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2. Jumlah Desa berstatus mandiri	Desa	6	13	216,67	Sangat Tinggi
3.	Terkendalnya angka kelahiran total (TFR)	3. Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,06	1,38	133,01	Sangat Tinggi
		4. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	11,52	9,51	117,45	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	84,57	100,68	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian							132,65

Berdasarkan tabel di atas, dari lima indikator sasaran strategis, kelima indikator tersebut dapat tercapai dengan status capaian sangat tinggi dengan empat indikator tercapai diatas 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

RINGKASAN EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL..... iv

DAFTAR GAMBAR..... vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

 1. Latar Belakang 1

 2. Landasan Hukum..... 2

 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara 3

 4. Struktur Organisasi..... 4

 5. Keadaan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara..... 6

B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi..... 9

C. Sistematika LKjIP 11

BAB II. PERJANJIAN KINERJA 13

A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara..... 13

 1. Visi 13

 2. Misi 15

B. Indikator Kinerja Penyelarasan..... 17

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... 18

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA..... 24

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 25

 Sasaran 1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah..... 26

 Sasaran 2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa 32

 Sasaran 3. Terkendalinya angka kelahiran total (TFR) 47

 Sasaran 4. Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat 73

B. Realisasi Anggaran 79

C. Capaian Kinerja Lainnya 88

BAB IV. PENUTUP 89

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	7
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2024	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Penyelarasan.....	18
Tabel 2.2	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024	19
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2024	20
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	20
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja.....	24
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024	25
Tabel 3.3	Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah	27
Tabel 3.4	Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 per komponen	27
Tabel 3.5	Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2019-2024 ..	29
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah.....	30
Tabel 3.7	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1	31
Tabel 3.8	Capaian Indikator Indikator Program Sasaran Strategis Ke-1.....	31
Tabel 3.9	Capaian Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri.....	32
Tabel 3.10	Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2024	34
Tabel 3.11	Nilai IDM Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2024	34
Tabel 3.12	Sebaran Desa Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024	35
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2019-2024	35

Tabel 3.14	Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah	36
Tabel 3.15	Rekapitulasi Perkembangan Dana Desa Tahun 2020 - 2024	36
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1	39
Tabel 3.17	Capaian Indikator Program yang mendukung Sasaran Strategis Ke-1	39
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2018 - 2024 ...	40
Tabel 3.19	Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR).....	49
Tabel 3.20	Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2024	49
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020-2024	50
Tabel 3.22	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah	51
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2024.....	51
Tabel 3.24	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3	53
Tabel 3.25	Capaian Indikator Program, Sasaran Strategis Ke-3-TFR	53
Tabel 3.26	Capaian Indikator Program yang Mendukung TFR Tahun 2020-2024	54
Tabel 3.27	Capaian Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	64
Tabel 3.28	ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2024	64
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2020-2024	65
Tabel 3.30	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah	66
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2024	66
Tabel 3.32	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3, Indikator ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun	68
Tabel 3.33	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-3.....	68
Tabel 3.34	Capaian Indikator Program yang Mendukung ASFR 15-19 Tahun, Tahun 2020-2024	69

Tabel 3.35	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	74
Tabel 3.36	Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	75
Tabel 3.37	Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat	75
Tabel 3.38	Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 - 2024	75
Tabel 3.39	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-4, Indikator Indeks Kepuasan masyarakat	77
Tabel 3.40	Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-4	77
Tabel 3.41	Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana Tahun 2023-2024	80
Tabel 3.42	Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2024	80
Tabel 3.43	Rekapitulasi Perhitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2024	85
Tabel 3.44	Perkembangan Pagu Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2024	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Banjarnegara....	5
Gambar 1.2	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024	6
Gambar 1.3	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	6
Gambar 1.4	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	7
Gambar 1.5	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2024	8
Gambar 3.1	Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2020-2024	29
Gambar 3.2	Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2019 - 2024	35
Gambar 3.3	Besaran Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020-2024	37
Gambar 3.4	Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2024	50
Gambar 3.5	Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020-2024.....	51
Gambar 3.6	ASFR (Usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2024	65
Gambar 3.7	Angka Kelahiran Remaja (Perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2020-2024	65
Gambar 3.8	Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024	76
Gambar 3.9	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019-2024	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Tujuan pelaporan kinerja sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermades PPKB) Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Laporan Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dispermades PPKB merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024 merupakan gambaran pencapaian sasaran ataupun tujuan, sebagai penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan strategi

yang mengindikasikan tingkat keberhasilan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dispermades PPKB bisa dilihat melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran maupun capaian kinerja lainnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

LKjIP juga sebagai alat kendali dan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Landasan Hukum

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) ;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
- i. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Nomor 36).

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang

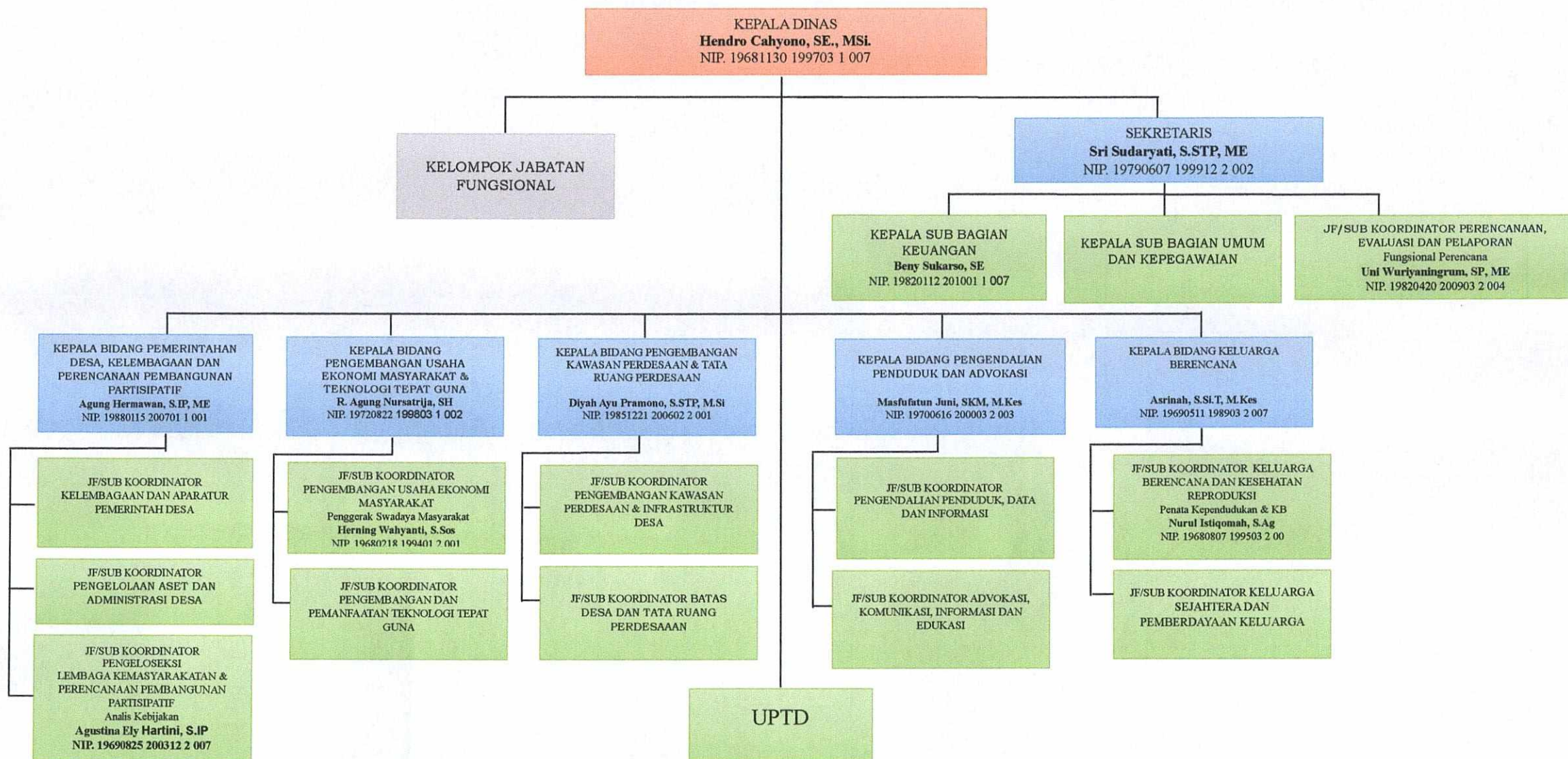
pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara merupakan dinas Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon II, dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III) dan 14 (empat belas) Sub Koordinator dan Sub Bagian (Eselon IV) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

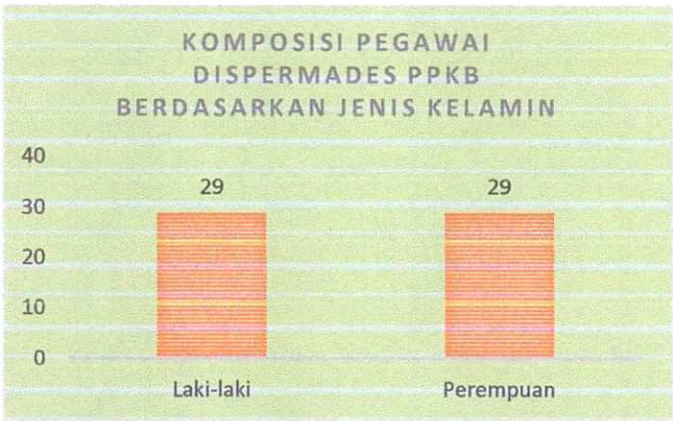
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

5. Keadaan Internal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana

Dispermades PPKB memiliki sumberdaya manusia sebanyak 58 orang yang terdiri dari 29 laki-laki dan 29 perempuan. Tahun 2024 Dispermades PPKB mendapatkan tambahan tenaga ASN melalui formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 8 orang.



Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

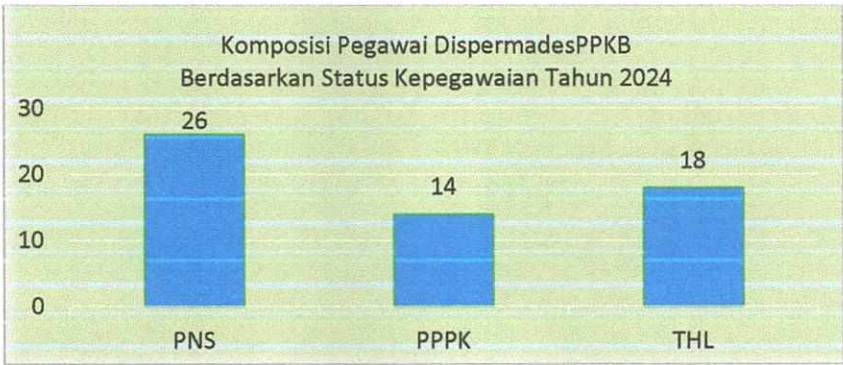
a. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut status kepegawaian

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 1. 1. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	PNS	14	12	26
2.	PPPK	6	8	14
3.	THL	9	9	18
	Jumlah	29	29	58

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2024



Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024

Komposisi pegawai yang ada pada DISPERMADES PPKB tahun 2024 berdasarkan status kepegawaian jumlah terbesar yaitu PNS masih sebesar 26 orang, kemudian PPPK sebanyak 14 orang dan THL sebanyak 18 orang. Jumlah PNS turun dibandingkan tahun sebelumnya karena memasuki masa pensiun serta mutasi kepegawaian.

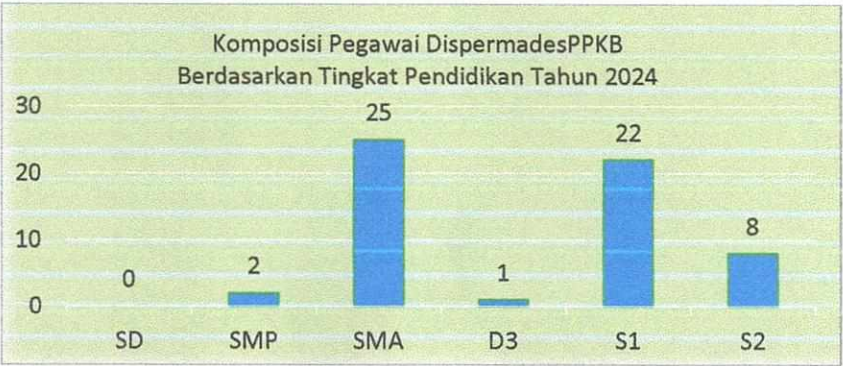
b. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut tingkat pendidikan

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada pada Dispermades PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	2	0	0	0	2
3	SMA Sederajat	7	0	9	9	25
4	D3	0	1	0	0	1
5	S1	3	5	6	8	22
6	S2	2	6	0	0	8
	Jumlah	14	12	15	17	58

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2024



Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, komposisi pegawai yang ada di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara tahun 2024 berdasarkan pendidikan jumlah terbanyak yaitu pendidikan SMA sebanyak 25 orang, disusul S1 sebanyak 22 orang, S2 sebanyak 8 orang. Pada Tahun 2024, dari 25 pegawai dengan pendidikan SMA, 7 pegawai sedang menempuh Pendidikan S1, dan untuk THL sejumlah 18 orang, pendidikan dalam pengangkatan menggunakan pendidikan SMA walaupun yang bersangkutan telah memiliki pendidikan D3/D4/S1. Tingkat pendidikan merupakan salah satu unsur berpengaruh terhadap indeks profesionalisme ASN dan pangkat/jabatan dalam mekanisme jabatan fungsional.

- c. Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut pangkat dan golongan ruang
Komposisi pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2024
pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1. 3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No	Pangkat	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1	-	1
2	Pembina Tk. I	IV/b	-	2	2
3	Pembina	IV/a	2	4	6
4	Penata Tk. I	III/d	1	2	3
5	Penata	III/c	-	1	1
6	Penata Muda Tk.I	III/b	2	2	4
7	Penata Muda	III/a	2	1	3
8	Pengatur Tingkat I	II/d	3	-	3
9	Pengatur	II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	-	2
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
12	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
13	Juru	I/c	-	-	-
14	PPPK	-	6	8	14
15	THL	-	9	9	18
	Jumlah		29	29	58

Sumber : Data Kepegawaian Dispermades PPKB, 2024



Gambar 1.5. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB, jumlah terbanyak yaitu THL. Sedangkan untuk PNS jumlah terbanyak pada golongan III sebanyak 11 orang, kemudian disusul golongan IV sebanyak 9 orang dan golongan II sebanyak 6 orang. Jumlah masing-masing golongan menurun dari tahun sebelumnya karena memasuki masa purna tugas dan mutasi. Golongan ruang pegawai berkaitan dengan jenjang pendidikan serta masa kerja.

B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa, merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional Wilayah perdesaan dianggap sebagai wilayah yang tertinggal, miskin, dan pembangunannya lambat karena jauh dari pusat pemerintahan padahal sebenarnya wilayah pedesaan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah hanya saja belum dimanfaatkan dengan maksimal.

Strategi pembangunan perdesaan seyogyanya diarahkan untuk mengatasi problem kemiskinan dan ketimpangan yang semakin tinggi. Seluruh potensi yang ada harus menjadi penopang gerakan desa membangun. Pemerintah menyalurkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang jumlahnya semakin meningkat, desa membutuhkan terus-menerus pasokan pengetahuan agar mampu mengoptimalkan kewenangan yang telah diberikan sesuai UU Desa guna mewujudkan desa yang mandiri. Ekonomi Desa ke depan harus menjejak kuat pada basis potensi ekonomi desa yang didayagunakan disertai dengan akses dan kepemilikan masyarakat desa atas alat-alat produksi ekonomi yang ada di desa.

Sejalan dengan misi haluan kebijakan pembangunan perdesaan yang transformatif, organisasi ekonomi berperan penting dalam memikul beban untuk menggerakkan aktivitas ekonomi desa yang memiliki semangat kolektivitas, pemerataan, dan solidaritas sosial. Organisasi ekonomi itu dapat berupa BUM Desa, BUM Desa bersama, koperasi, lembaga keuangan mikro, UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), atau usaha bersama lainnya. Tidak kalah pentingnya organisasi ekonomi ini haruslah memiliki kecakapan dalam menjalankan usaha serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kemanfaatan secara sosial.

Pemerintah melalui PP Nomor 11 Tahun 2021 mendorong Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu wadah mengelola usaha, memanfaatkan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perdesaan dan kemandirian desa.

Seiring dengan meluasnya kewenangan Desa, tuntutan serta tanggung jawab desa pun semakin besar. Perangkat desa memerlukan kapasitas yang memadai untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Apalagi memasuki sembilan tahun pelaksanaan UU Desa dan terbitnya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana semakin banyak misi dan harapan yang ditumpukan kepada desa, kemampuan dan kapasitas perangkat desa yang sesuai dengan amanat perundangan perlu terealisasi.

Selain Pembangunan desa, pembangunan secara menyeluruh termasuk pula didalamnya meningkatkan kualitas hidup manusia berkaitan dengan masalah kependudukan. Bahwa penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. (UU No. 52 Tahun 2009).

Penyelenggaraan keluarga berencana telah memberikan dampak positif pada tren penurunan Fertilitas dan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penduduk. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian ibu dan anak, merupakan penanda bahwa terjadi peningkatan kualitas penduduk. Peningkatan kualitas penduduk dan derajat kesehatan masyarakat disisi lain memiliki tantangan yang berkaitan dengan isu strategis stunting. OPD KB memiliki peran aktif melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana OPD KB ditunjuk sebagai Sekretaris Percepatan penurunan Stunting.

Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam membangun desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 pada tujuan kelima dalam yaitu Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu Pemerintah juga berkomitmen melalui Pembangunan kependudukan melalui tujuan ketujuh yaitu Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Tujuan tersebut menjadi dasar Dispermades PPKB selaku perangkat daerah yang mampu urusan pemberdayaan Masyarakat dan desa serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendampingi, memfasilitasi dan membina penyelenggaraan desa dan Masyarakat desa serta melaksanakan Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kewenangannya.

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang ditandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Belum optimalnya tertib pengelolaan keuangan dan asset desa;
 - d. Belum optimalnya pengelolaan informasi desa
3. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa
4. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
 - c. Kurangnya optimalnya manajemen pengelolaan BUMDes;
 - d. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat/BUMDes;
 - e. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;
5. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
6. Belum optimalnya peran Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (FAPSEDU), Koalisi Kependudukan dan lintas sektor dalam upaya mewujudkan Pembangunan berwawasan Kependudukan, hal ini ditandai dengan masih tingginya laju pertumbuhan penduduk;
7. Belum terkontrolnya Total Fertility Rate (TFR);
8. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;
9. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
10. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;

11. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
12. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penyusunan laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Isu-Isu Strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Sistematika Penyusunan LKJIP

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Indikator Kinerja Penyelarasan
- C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, di mana salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang mengalami masa transisi agar menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah periode 2023-2026. Nomenklatur dokumen dimaksud adalah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. RPD Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang disusun secara teknokratis.

Periode kepemimpinan Bupati Banjarnegara sebelumnya berakhir pada tahun 2022, dengan masa kepemimpinan 2017-2022. Pemilihan kepala daerah berikutnya dilaksanakan pada pilkada serentak secara nasional tahun 2024. Dengan demikian, Kabupaten Banjarnegara termasuk daerah yang mengalami transisi sehingga nomenklatur dokumen perencanaan jangka menengah adalah Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan salah satu penjabaran dari RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Bahwa visi dan misi dalam RPD Tahun 2023-2026 mempedomani dokumen RPJP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025. Tahun 2024 merupakan tahun kedua Dispermades PPKB atas pelaksanaan Renstra Tahun 2023-2026.

1. VISI

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, visi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat

kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

2. MISI

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat** yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi

pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang, serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab** yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah

untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

B. Indikator Kinerja Penyelarasan

Berdasarkan Berita Acara hasil Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2023-2026 tanggal Tiga Januari Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara, ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Nomor : 021.1/17/DispermadesPPKB/2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Penyelarasan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Penyelarasan dalam Indikator kinerja tersebut selanjutnya dilakukan penyelarasan Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang diselaraskan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Penyelarasan

No	Sasaran Strategis	Indikator	Sebelum Penyelarasan				Setelah Penyelarasan			
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77,5	78	78,5	77	77,5	78	78,5
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	3	4	5	6	3	6	7	8
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR)	2,08	2,06	2,04	2,02	2,08	2,06	2,04	2,02
		Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,36	22,06	21,7	21,46	22,36	11,52	11,51	11,50
4.	Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84	85	86	83	84	85	86

C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Tujuan strategis Dispermades PPKB dalam rangka mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, yaitu pada misi sebagai berikut :

- 1. Misi 1. : **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya Masyarakat;**
- 2. Misi 3. : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab**

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis jangka menengah, ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja tahunan Dispermades PPKB sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2024. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari kepala daerah kepada unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Tahun

Kinerja Tahun 2024. Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara mengalami satu kali perubahan yaitu pada anggaran perubahan Tahun 2024. Perubahan pada target indikator yang menyesuaikan dengan penyesuaian dan besaran alokasi anggaran untuk optimalisasi kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	
			Murni	Perubahan
1		2	3	4
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5	77,5
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	4	6
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	Angka kelahiran Total (TFR)	2,06	2,06
		Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,06	11,52
4.	Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84
	Anggaran (Rp)		25.291.060.645,00	25.293.932.869,00

Revisi Perjanjian Kinerja tersebut menindaklanjuti Berita Acara hasil Reviu Dokumen Perencanaan Tahun 2023-2026 tanggal Tiga Januari Tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara. Revisi target pada 2 (dua) indikator yaitu Jumlah Desa berstatus mandiri dan Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) mempertimbangkan realisasi capaian pada tahun 2023.

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tertuang pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja		Target
1	2	3		4
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1.1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,5
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2.1	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	6
3.	Terkendalnya angka kelahiran total (TFR)	3.1	Angka kelahiran Total (TFR)	2,06
		3.2	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11,52
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	4.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2024

Indikator kinerja Kepala Dinas Tahun 2024 tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Dengan adanya penjenjangan perjanjian kinerja ini diharapkan terdapat kesinambungan antara target kinerja kepala dengan pejabat dibawahnya.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2023 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp13.677.212.869,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp11.616.720.000,00. Anggaran Sub Bidang KB terbagi menjadi 1).DAK Non Fisik Rp.399.990.000,00. Rincian anggaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sebagai berikut :

Tabel 2.4 Rincian Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendlaian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.092.260.269,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00
	5. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.020.474.969,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.972.309.969,00
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	48.165.000,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.380.800,00
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	744.380.800,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	277.861.500,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
	Pemerintah Daerah	
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	277.861.500,00
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.543.000,00
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.600.000,00
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.943.000,00
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.000.000,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	98.000.000,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00
B.	Program Penataan Desa	144.702.600,00
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	144.702.600,00
	1. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	144.702.600,00
C.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	20.000.000,00
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	20.000.000,00
	1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000,00
D.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.223.250.000,00
7.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.223.250.000,00
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.900.000.000,00
	2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	19.000.000,00
	3. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Kepala Desa	660.000.000,00
	4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000,00
	5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	40.000.000,00
	6. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	57.325.000,00
	7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	531.925.000,00
E.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	717.000.000,00
8.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.000.000,00
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	235.000.000,00
	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	32.000.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
	4. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00
F.	Program Pengendalian Penduduk	472.000.000,00
9.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	472.000.000,00
	1. Sub Kgiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00
	2. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	234.000.000,00
	3. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	168.000.000,00
	4. Sub Kegiatan Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000,00
G.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.247.120.000,00
10.	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.740.000.000,00
	1. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	1.010.000.000,00
	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	300.000.000,00
	4. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	118.000.000,00
	5. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	32.000.000,00
	6. Sub Kegiatan Advokasi Program Program Bangga Kencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	200.000.000,00
11.	Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	884.000.000,00
	1. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	884.000.000,00
12.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Keutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.770.470.000,00
	1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450.390.000,00
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk panjang (MKJP)	2.182.080.00,00
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	30.000.000,00
	4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.000.000,00
	5. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40.000.000,00
13.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	852.650.000,00
	1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.810.000,00
	2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	848.840.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
H.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.377.600.000,00
14.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	438.400.000,00
	1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	80.000.000,00
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000,00
	3. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor/UPPKA)	300.000.000,00
	4. Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor/UPPKA)	20.000.000,00
15.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.939.200.000,00
	1. Sub Kegiatan Pemantauan dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	2.352.000.000,00
	2. Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	2.587.200.000,00
	Jumlah	25.293.932.869,00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2024

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Dispermades PPKB menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang diukur dengan 5 (lima) indikator.

Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Pengukuran data kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja. Rumus yang digunakan untuk menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Status capaian indikator ditetapkan berdasarkan skala pengukuran sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian rencana Tingkat} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Tabel.3.1 Skala Pengukuran Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Nilai Interval Konversi (NIK)
1	2	3
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 65%	Sangat Rendah

Sumber : Permenpan 86 Tahun 2017

Realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa dari 5 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat tinggi (132,65%). Pagu Anggaran sebesar Rp25.293.932.869,00 dengan realisasi Rp. 24.420.343.389,00 atau 96,65 persen, sehingga terdapat efisiensi 3,35 persen. Capaian kinerja dianggap efisien apabila persentase realisasi output lebih besar dibandingkan dengan presentase realisasi anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berikut merupakan uraian pencapaian sasaran strategis dan program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 3.2. Pencapaian Indikator Sasaran Strategis Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis/Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1		2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,50	73,95	95,42	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	2. Jumlah Desa berstatus mandiri	Desa	6	13	216,67	Sangat Tinggi
3.	Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	3. Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,06	1,38	133,01	Sangat Tinggi
		4. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	11,52	9,51	117,45	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	5. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	84,57	100,68	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian							132,65

Sumber : Pengukuran Kinerja DispermadesPPKB, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat lima indikator sasaran strategis, keseluruhan indikator tercapai dengan sangat tinggi. Untuk memastikan agar sasaran strategis tercapai, Dispermades PPKB telah mengidentifikasi resiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran strategis. Beberapa resiko sasaran strategis antara lain :

- 1. Status perkembangan desa berdasarkan IDM tidak meningkat
- 2. Pendampingan desa tidak mencakup keseluruhan
- 3. Terdapat permasalahan/sengketa batas desa

4. Unit usaha BUMDes tidak sesuai dengan potensi Desa
5. Pernikahan usia muda
6. Persepsi negatif masyarakat akan Program KB
7. Keyakinan masyarakat untuk tidak ber KB
8. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya keberlangsungan pelayanan KB

Untuk mengatasi resiko, Dispermades PPKB telah melakukan berbagai rencana aksi yang didukung program dan kegiatan diantaranya pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa termasuk pengembangan ekonomi Masyarakat desa serta kelembagaan desa, Pembangunan kependudukan, pembinaan keluarga berencana, serta pembangunan kesejahteraan keluarga.

Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan daerah didukung oleh penyelenggaraan pemerintahan perangkat daerah yang baik dan terukur melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja (Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014).

Berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Banjarnegara Nomor : 700/65/LHE/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Berdasarkan evaluasi internal Inspektorat Daerah Kabupaten Banjarnegara, nilai akuntabilitas Dispermades PPKB Tahun 2023 sebesar **73,95** dengan kategori BB "Sangat Baik" dengan pernyataan : "Akuntabilitas Kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator". Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan dengan target ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.3. Capaian Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,50	73,95	95,42	Sangat Tinggi

Sumber Data : Laporan LHE SAKIP Nomor 700/65/LHE/2024

Nilai SAKIP sebagaimana tersebut di atas merupakan akumulasi penilaian terhadap 4 (empat) komponen kinerja. Rincian nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara per komponen sebagai berikut :

Tabel 3.4.Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 per komponen

No	Komponen / Sub Komponen	Bobot Penilaian	Hasil Penilaian	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,20	74,00%
2.	Pengukuran Kinerja	30%	22,20	74,00%
3.	Pelaporan Kinerja	15%	11,55	77,00%
4.	Evaluasi Kinerja	25%	18,00	72,00%
	Jumlah	100%	73,95	73,95%

Sumber Data : LHE SAKIP Nomor 700/65/LHE/Insp/2024

Kelemahan pada masing-masing komponen berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yaitu :

a. Perencanaan Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74%. Terdapat kelemahan dalam implementasi perencanaan kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara yaitu :

- 1) Bab IV Renstra “Tujuan dan sasaran” belum menyajikan indikator sasaran dan tujuan perangkat daerah. Indikator sasaran hanya disajikan pada Bab VII renstra;
- 2) Terdapat ketidakselarasan sasaran pada dokumen perencanaan kinerja, yaitu atas sasaran ke 4 (empat) pada Renstra dan Perjanjian Kinerja berupa “Meningkatnya kualitas layanan masyarakat” sedangkan pada dokumen IKU berupa “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”. Sasaran itu diukur dengan indikator yang sama yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat”.

b. Pengukuran Kinerja (Bobot Nilai 30%)

Komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai sebesar “22,20” dari target sebesar 30 atau 74%. Terdapat kelemahan dalam implementasi pengukuran kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bahwa pengukuran

kinerja dengan memanfaatkan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

c. Pelaporan Kinerja ,

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “11,55” dari target sebesar 15 atau 77%.

d. Evaluasi Kinerja Internal (Bobol Nilai 25)

Komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai sebesar “18” dari target sebesar 25 atau 72%. Terdapat kelemahan dalam implementasi evaluasi kinerja internal Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara yaitu evaluasi kinerja internal yang dilakukan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi belum dilaksanakan secara optimal.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara beserta seluruh jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut :

- 1) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Perencanaan Kinerja dengan :
 - a) Melakukan reviu untuk penyelarasan indikator dan target antar bab dalam Renstra;
 - b) Melakukan penyelarasan sasaran antar dokumen perencanaan kinerja;
 - c) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh pegawai dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada **Komponen Pengukuran Kinerja** dengan :
 - a) Mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran kinerja melalui teknologi informasi;
 - b) Meningkatkan pemahaman dan kepedulian serta komitmen seluruh unit serta pegawai atas hasil pengukuran kinerja;
- 3) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada Komponen Pelaporan Kinerja seperti mengoptimalkan internalisasi informasi dalam laporan kinerja guna meningkatkan kepedulian seluruh pegawai dan selalu mempengaruhi budaya organisasi yang berorientasi kinerja;
- 4) Melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencapai nilai optimal pada **Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** dengan :
 - a) Mengoptimalkan evaluasi kinerja internal melalui teknologi aplikasi sehingga pelaksanaan evaluasi kinerja dapat dilakukan secara efisien;

- b) Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dengan melakukan upaya perbaikan tindaklanjut hasil evaluasi guna perbaikan manajemen kinerja secara berkelanjutan.

Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satu an	2020	2021	2022	2023	2024	Rata rata	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya pengelolaan penyelenggara an Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,05	76,28	77,42	73,45	73,95	75,03	Naik

Sumber Data : Laporan LHE SAKIP, 2020-2024



Gambar 3.1. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Dispermades PPKB Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai SAKIP cenderung naik dari tahun 2019 sampai dengan 2022, untuk kemudian menurun pada tahun 2023 sebesar 3,97 point. Terdapat perbedaan metode penilaian untuk periode 2019 s/d 2022 yaitu berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 12 Tahun 2015 dimana komponen penilaian meliputi 5 unsur (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Kinerja). Sedangkan penilaian SAKIP mulai Tahun 2023 menggunakan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 dimana komponen penilaian meliputi 4 unsur yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi kelemahan yaitu adanya ketidakselarasan indikator pada dokumen perencanaan. Hal tersebut mengakibatkan pada pencapaian nilai SAKIP kurang optimal. Realisasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.6. Realisasi Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	4	5	6
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,00	73,95	94,80	Sangat Tinggi

Sumber Data : Pengukuran Dispermades PPKB Tahun 2024

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian sasaran :

1. Melaksanakan penyelarasan sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan berdasarkan berita acara hasil reuiu penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran aparat Dispermades PPKB dalam budaya berorientasi kinerja;
3. Melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala dan lebih tepat waktu;
4. Memanfaatkan teknologi infomasi dalam proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dan perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan;

Hambatan dan Tantangan dalam pencapaian sasaran :

1. Dalam penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, pada aplikasi SIPD terkadang terdapat kendala antara lain dalam pengisian indikator maupun dalam implementasi perencanaan dan penatausahaan keuangan yang tidak bisa berjalan bersamaan. Pada saat pergeseran anggaran, maka menu penatausahaan keuangan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menghambat penyerapan anggaran;
2. Pada awal tahun, penatausahaan keuangan SIPD belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Terdapat regulasi-regulasi baru yang berkaitan dengan implementasi perencanaan anggaran, sehingga perlu kecekatan dan gerak cepat agar proses penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran bisa berjalan selaras;
4. Pelaksanaan implementasi SAKIP belum secara optimal berbasis aplikasi dan teknologi informasi.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian strategis didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang), Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 1

Orang), serta dibantu oleh 1 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah Indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,50	73,95	95,42	25.000.000	24.290.000	97,16	2,84

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Penggunaan sumberdaya untuk pencapaian indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan anggaran Rp25.000.000,00 serta realisasi Rp24.290.000,00 (97,16%) sehingga tingkat efisiensi anggaran 2,84. Pada dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran, pagu tersebut terdapat pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terdiri dari 1 sub kegiatan yaitu Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.8. Capaian Indikator Program Sasaran Strategis Ke-1

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja.	%	100,00	100,00	100,00
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	17	17	100,00

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Jumlah dokumen RKS-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD sebanyak sebanyak 17 dokumen (1).Renstra, 2).Perjanjian Kinerja 2024, 3).Pakta Integritas 2024, 4).RKT Tahun 2025, 5).Rencana Aksi Tahun 2024, 6).RKO Tahun 2024, 7).LKPJ-LPPD Tahun 2023, 8).LKJIP 2023, 9).Renja 2025, 10).RKA Perubahan 2024, 11).DPA Perubahan, 12). Perjanjian

Kinerja Perubahan TA.2024, 13).POK TA. 2024, 14).Pengukuran Kinerja Perubahan TA 2024, 15).Evaluasi Kinerja TA 2024, 16). RKA TA. 2025, 17).DPA TA 2025.

Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kepala Daerah yaitu Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu ditunjang dengan meningkatnya kinerja pemerintahan desa. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, diukur dengan indikator Jumlah Desa berstatus mandiri. Indikator ini dipilih untuk mengetahui perkembangan tingkat kemandirian desa berdasarkan Indeks Desa Membangun.

Indeks Desa Membangun adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mengukur kemandirian suatu Desa melalui analisis dan nilai komposit seluruh nilai skoring masing-masing indikator terpilih berdasarkan konsep kebijakan pembangunan yang ditetapkan serta otoritas kewenangan, tugas dan fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri, sedangkan tujuan penyusunan Indeks Desa Membangun adalah untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian Desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan Desa. Tiga pendekatan dalam melakukan penilaian keberhasilan program pembangunan desa atau yang disebut dengan indeks Desa Membangun (IDM) yaitu indeks ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi (lingkungan).

Penetapan status desa sebagaimana dimaksud yaitu berdasarkan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa membangun (IDM). Pemutakhiran IDM Tahun 2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, realisasi kinerja Jumlah Desa berstatus mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.9. Capaian Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	6	13	216,67	Sangat Tinggi

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT Nomor 400 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi indikator sejumlah 6 desa melebihi dari target 3 desa dengan capaian 216,67 persen (sangat baik). Hal tersebut menunjukkan semakin banyak Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa- desa yang bertatus mandiri sebagai berikut :

1. Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja
2. Desa Mantrianom Kecamatan Bawang
3. Desa Pucang Kecamatan Bawang
4. Desa Gembongan Kecamatan Sigaluh
5. Desa Madukara Kecamatan Madukara
6. Desa Kutayasa Kecamatan Madukara
7. Desa Pekauman Kecamatan Madukara
8. Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa
9. Desa Tapen Kecamatan Wanadadi
10. Desa Wanadadi Kecamatan Wanadadi
11. Desa Pagentan Kecamatan Pagentan
12. Desa Penusupan Kecamatan Pejawaran
13. Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Secara umum nilai indeks komposit di Kabupaten Banjarnegara tertinggi yaitu Indeks Ketahanan Sosial artinya memiliki kemampuan mengolah potensi sumber daya sosial secara baik, sedangkan indeks ketahanan ekonomi dan ekologi/lingkungan relative belum optimal pencapaiannya. Indeks ekonomi rendah artinya belum bisa secara optimal memanfaatkan dan mengolah potensi ekonomi. Sedangkan indek ketahanan ekologi/lingkungan karena sebagian besar wilayah di Kabupaten Banjarnegara rawan terjadi bencana sehingga membutuhkan kemampuan tanggap bencana yang lebih unggul. Rekapitulasi status kemajuan dan kemandirian desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.10. Rekapitulasi Status Kemajuan dan Kemandirian Desa di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2024

No	Status kemajuan dan kemandirian desa	Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mandiri	2	2	2	2	2	6	13
2	Maju	22	28	33	44	64	73	87
3	Berkembang	176	201	209	208	199	187	166
4	Tertinggal	64	35	22	13	1	0	0
5	Sangat Tertinggal	2	2	0	0	0	0	0
	Jumlah	266	266	266	266	266	266	266

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa, 2018-2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa status kemandirian desa di Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan yang positif. Hal ini terlihat dari jumlah desa maju dan mandirinya semakin bertambah, dan di sisi lain jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal sudah tidak ada. Jumlah desa berkembang dari tahun 2018 sampai 2020 memiliki kecenderungan meningkat karena ada penambahan desa tertinggal yang naik strata. Kemudian jumlah desa berkembang menurun dari tahun 2021 karena sebagian mulai mengalami kenaikan strata menjadi desa maju.

Desa mandiri di Banjarnegara selama 6 (enam) tahun pelaksanaan Undang-Undang Desa yakni Tahun 2017 sampai 2022 berjumlah 2 (dua) yakni Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja dan Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa, hingga pencapaian pada Tahun 2023 mampu menambah 4 (empat) desa yang naik menjadi desa mandiri, sehingga total menjadi 6 desa. Kemudian pada tahun 2024, dari target 6 desa terdapat penambahan 7 desa sehingga total menjadi 13 desa. Adapun nilai Indeks Desa Mandiri dirinci per indeks penilaian seperti terinci dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.11. Nilai IDM Desa Mandiri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2024

NO	DESA	Kecamatan	2023				2024				Tahun Mandiri
			IKS	IKE	IKL	IDM	IKS	IKE	IKL	IDM	
1.	Wanayasa	Wanayasa	0,777	0,917	0,933	0,856	0,771	0,917	0,993	0,874	2017
2.	Mandiraja Kulon	Mandiraja	0,886	0,950	0,667	0,834	0,886	0,950	0,667	0,834	2018
3.	Pucang	Bawang	0,931	0,850	0,667	0,816	0,949	0,850	0,667	0,822	2023
4.	Madukara	Madukara	0,851	0,817	0,867	0,845	0,886	0,833	0,867	0,862	2023
5.	Wanadadi	Wanadadi	0,897	0,950	0,600	0,816	0,897	0,967	0,600	0,821	2023
6.	Penusupan	Pejawaran	0,811	0,917	0,800	0,843	0,834	0,955	0,800	0,861	2023
7.	Mantrianom	Bawang	0,766	0,750	0,867	0,794	0,846	0,750	0,867	0,821	2024
8.	Gembongan	Sigaluh	0,834	0,733	0,867	0,811	0,834	0,800	0,867	0,834	2024
9.	Kutayasa	Madukara	0,869	0,733	0,800	0,801	0,857	0,733	0,867	0,862	2024
10.	Pekauman	Madukara	0,811	0,800	0,800	0,804	0,817	0,800	0,933	0,850	2024
11.	Petambakan	Madukara	0,789	0,900	0,667	0,785	0,817	0,900	0,933	0,884	2024
12.	Tapen	Wanadadi	0,800	0,850	0,667	0,772	0,800	0,850	0,867	0,839	2024
13.	Pagentan	Pagentan	0,800	0,767	0,800	0,789	0,817	0,850	0,800	0,8224	2024

Sumber : Pemutakhiran IDM Kemendes PDTT, 2023-2024

Tabel 3.12. Sebaran Desa Berdasarkan Status Kemajuan dan Kemandirian per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024

No	Kecamatan	Tahun 2024					Jumlah
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
1.	Susukan	-	-	12	3	-	15
2.	Purwareja Klampok	-	-	6	2	-	8
3.	Mandiraja	-	-	7	8	1	16
4.	Purwanegara	-	-	7	6	-	13
5.	B a w a n g	-	-	10	6	2	18
6.	Banjarnegara	-	-	4	-	-	4
7.	S i g a l u h	-	-	7	6	1	14
8.	Madukara	-	-	5	9	4	18
9.	Banjarmangu	-	-	9	8	-	17
10.	Wanadadi	-	-	3	6	2	11
11.	R a k i t	-	-	7	4	-	11
12.	Punggelan	-	-	16	1	-	17
13.	Karangkobar	-	-	10	3	-	13
14.	Pagentan	-	-	11	4	1	16
15.	Pejawaran	-	-	13	3	1	17
16.	B a t u r	-	-	7	1	-	8
17.	Wanayasa	-	-	6	10	1	17
18.	Kalibening	-	-	16	-	-	16
19.	Pandanarum	-	-	8	-	-	8
20.	Pagedongan	-	-	3	6	-	9
	Jumlah	-	-	166	87	13	266

Sumber Data : Keputusan Kemendes PDTT Nomor 400 Tahun 2024

Berdasarkan tabel dia atas, pada tahun 2024 jumlah desa sangat tertinggal dan tertinggal menjadi nol dengan status meningkat ke klasifikasi lebih tinggi. Sebaran desa bersatatus mandiri terdapat di 8 kecamatan dan terbanyak di Kecamatan Madukara sebanyak 4 desa. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2018-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.13. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2019-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	2	2	2	6	13	5	Naik

Sumber Data : Pemutakhiran IDM Tahun 2020 – 2024



Gambar 3.2. Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas jumlah desa mandiri meningkat sangat signifikan dibanding tahun sebelumnya yang tidak terdapat kemajuan (jumlah stagnan). Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah sebagai berikut :

Tabel 3.14. Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa	Jumlah Desa Berstatus Mandiri	Desa	8	13	162,5	Sangat Tinggi

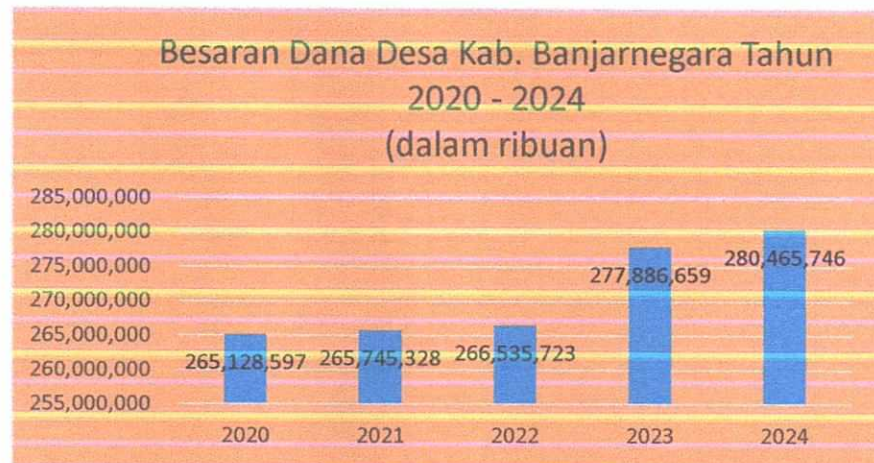
Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, realisasi jumlah desa mandiri sudah mencapai target jangka menengah dengan capaian 100 persen. Artinya perkembangan tingkat kemajuan dan kemandirian desa sangat baik. Indeks Desa Membangun menggambarkan perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Rekapitulasi perkembangan dana desa tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Rekapitulasi Perkembangan Dana Desa Tahun 2020 - 2024

No	Kecamatan	Anggaran (dalam ribuan)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Susukan	14.778.049	14.523.750	8.441.784	16.584.062	17.025.249
2.	Purwareja Klampok	7.417.299	7.931.135	16.590.820	9.684.260	9.834.253
3.	Mandiraja	15.417.431	16.909.556	14.837.377	18.062.552	18.703.250
4.	Purwanegara	13.553.389	15.302.273	16.675.367	17.301.328	17.513.085
5.	B a w a n g	15.965.451	17.892.956	3.967.452	16.926.687	16.847.923
6.	Banjarnegara	3.832.127	4067.968	10.794.997	4.617.442	4.648.809
7.	S i g a l u h	11.651.922	11.292.849	15.194.633	12.608.866	13.444.795
8.	Madukara	15.338.965	15.605.698	15.190.636	15.722.562	16.587.422
9.	Banjarmangu	15.614.269	15.699.949	9.733.816	16.121.260	17.052.643
10.	Wanadadi	9.460.292	9.404.022	10.919.771	9.993.068	10.925.638
11.	R a k i t	10.529.412	10.486.767	19.922.897	12.358.393	12.818.097
12.	Punggelan	19.148.895	18.759.766	12.664.618	22.470.328	22.680.094
13.	Karangobar	13.646.070	13.434.591	15.355.837	13.651.274	11.386.523
14.	Pagentan	16.013639	15.669.848	17.233.240	16.159.148	15.268.037
15.	Pejawaran	181.06.618	16.659.230	8.928.303	15.995.364	16.351.735
16.	B a t u r	86.11.191	8.488.235	19.139.746	8.764.798	9.085.207
17.	Wanayasa	190.35.310	17.791.138	16.514.795	17.417.179	16.985.909
18.	Kalibening	171.60.577	16.543.965	8.607.279	14.338.782	14.496.278
19.	Pandanarum	93.16.934	9.017.347	10.454.337	7.929.422	6.938.832
20.	Pagedongan	105.30.757	10.264.285	8.441.784	11.179.884	11.871.967
	Jumlah	265.128.597	265.745.328	266.535.723	277.886.659	280.465.746

Sumber Data : Data Dispermades PPKB



Gambar 3.3. Besaran Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan data di atas, dukungan Dana Desa memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Dukungan dana desa tersebut terbukti mampu meningkatkan status kemajuan dan kemandirian desa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan strata secara umum sebagai berikut :

1. Aspek sosial

- a. Meningkatnya keamanan desa dengan bertambahnya poskamling, meningkatnya pemberdayaan linmas serta kesadaran masyarakat akan keamanan lingkungan;
- b. Meningkatnya toleransi antar suku, agama dan ras di lingkungan masyarakat;
- c. Meningkatnya ketersediaan ruang publik yang tidak berbayar seperti lapangan olahraga. Serta meningkatnya keberadaan kelompok kegiatan olahraga di lingkungan masyarakat;
- d. Meningkatnya akses Kesehatan bagi masyarakat baik pusat pelayanan Kesehatan (Posyandu, PKD, Puskesmas, Klinik dan Rumah Sakit) maupun terpenuhinya tenaga Kesehatan sampai ke Desa;
- e. Meningkatnya akses Pendidikan bagi usia sekolah. SLB, PKBM, Ponpes di dorong menuju sekolah formal;
- f. Meningkatnya kualitas pemukiman masyarakat yang lebih baik. Diantaranya meningkatnya jumlah jamban sehat (ODF), ketersediaan dan pengelolaan tempat pembuangan sampah (TPS), meningkatnya ketersediaan sumber air minum bagi masyarakat serta berkurangnya area blank spot sinyal dimana desa menyiapkan fasilitas jaringan internet bagi warga desanya.

2. Aspek Ekonomi
 - a. Meningkatnya kebegaraman usaha ekonomi masyarakat (warung, Rumah Makan, kedai, toko modern, UMKM);
 - b. Meningkatnya ketersediaan jasa logistik (pengiriman);
 - c. Tersedianya lembaga keuangan (perbankan, BPR, koperasi);
 - d. Akses penduduk ke kredit lebih mudah;
 - e. Meningkatnya kualitas jalan baik nasional, daerah maupun desa.
3. Aspek Lingkungan
 - a. Berkurangnya pencemaran air / lingkungan;
 - b. Meningkatnya jumlah desa tanggap bencana di Kabupaten Banjarnegara. Sebagaimana diketahui wilayah Banjarnegara sebagian besar merupakan daerah rawan bencana tanah longsor dan banjir. Diharapkan desa tanggap sudah memiliki jalur evakuasi, menentukan titik kumpul, penganggaran bidang bencana serta ketersediaan sarana prasarana / peralatan tanggap bencana.

Upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian :

1. Meningkatkan komitmen kepada Pemerintahan Desa dalam peningkatan status perkembangan desa, sebagai implementasi dari pemanfaatan Dana Desa melalui pembinaan dan pendampingan dari aparat pemerintah kabupaten bekerjasama dengan Tenaga Pendamping Profesional Desa;
2. Dukungan pengalokasian Dana Desa bagi seluruh desa melalui PMK Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
3. Pemberian penghargaan dan lencana Desa Mandiri dari pemerintah pusat (Kemendes PDTT) kepada desa berstatus mandiri. Piagam tersebut diserahkan berkat komitmen dan kerja keras desa untuk mewujudkan desa mandiri melalui pemutakhiran IDM;
4. Koordinasi dan konsolidasi yang efektif antara Dispermades PPKB, Aparat Kecamatan dan Tim Pendamping Profesional yang didukung Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam mendata potensi desa dalam mengawal proses pemutakhiran Indeks Desa Membangun;
5. Pendampingan dan pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa kepada 266 Desa di Kabupaten Banjarnegara.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 2 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 23 orang terdiri dari Golongan IV (3 orang), Golongan III (SMA : 1 Orang, S1 : 3 orang, S2 : 1 Orang), Golongan II (2 orang) serta dibantu oleh 7 Orang PPPK dan 6 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada tiga bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu, desa didampingi oleh 6 orang Tenaga Pendamping Profesional, 16 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan 32 orang Pendamping Desa Pemberdayaan. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-1

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator : Jumlah Desa Berstatus Mandiri	6 Desa	13 Desa	216,67	6.104.952.600	6.010.580.488	98,45	1,55

Sumber Data : Pengukuran Knerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 216,67, sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 98,45 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien dengan tingkat efisiensi anggaran 1,55. Anggaran sebagaimana tersebut terbagi pada empat program yaitu (1). Program Penataan Desa, (2). Program Peningkatan Kerjasama Desa, (3). Program Administrasi Desa, (4). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.17. Capaian Indikator Program yang mendukung Sasaran Strategis Ke-1

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Penataan Desa	Swadaya Masyarakat terhadap pemberdayaan Masyarakat	%	37,50	38,65	103,07
B.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar desa	Dokumen	5	5	100,00
C.	Program Administrasi Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	67,29	67,29	100,00
		Jumlah BUMDes yang berkembang	BUMDes	7	45	642,86
D.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat	%	50	98,12	196,24
		Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	3	3,38	112,67

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Tabel 3.18 Realisasi Indikator Jumlah Desa Berstatus Mandiri Tahun 2020-2024

No	Program	Indikator	Satuan	Realisasi				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4					
	Program Penataan Desa	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat	%	27,81	26,95	36,96	37,02	38,65
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah kerjasama antar desa	Dokumen	1	2	3	4	5
	Program Administrasi Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	%	8,65	28,57	28,57	56,29	67,29
		Jumlah BUMDes yang berkembang	BUMDes	-	5	5	18	45
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat	%	-	-	-	45	98,12
		Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna	%	-	-	-	2,63	3,38

Sumber Data : Data DispermadesPPKB

Capaian Realisasi output sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 1 sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan yaitu Jumlah desa yang terfasilitasi penataan desa sebanyak 6 Desa.

- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan output Jumlah sarana dan prasarana desa sebanyak 6 unit, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. TMMD Sengkuyung I Desa Sinduaji Kec. Pandanarum pada tanggal 20 Februari sampai dengan 20 Maret 2024;
 - b. TMMD Sengkuyung II Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu pada tanggal 08 Mei sampai dengan 07 Juni 2024;
 - c. TMMD Sengkuyung III Desa Wanayasa Kec. Wanayasa pada tanggal 24 Juli sampai dengan 22 Agustus 2024;
 - d. TMMD Sengkuyung IV Desa Prendengan Kec. Banjarmangu pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2024;
 - e. Terlaksananya Karya Bhakti pada Desa Beji Kecamatan Banjarmangu dan Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa pada tanggal 4 Juli 2024 - 03 Agustus 2024;
 - f. Jumlah bantuan keuangan infrastruktur desa yang terfasilitasi penyaluran sebanyak 694 titik (PIK ; 45, Banprov : 326, Bansus : 323)

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan yaitu Jumlah kawasan perdesaan yang terbentuk sebanyak 5 Kawasan (Kawisesa – Sigaluh, Pajang Kaloka – Banjarmangu, Manggera – Pejawaran, Kalimasada – Kalibening, Pesona Kahyangan- Kecamatan Batur)

- ❖ Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, dengan output Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebanyak 4 Dokumen (Perdes Tentang Kerjasama Desa, SK Lembaga Kerjasama Desa (LKD), SK Perwakilan Desa dalam BKAD, Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Kerjasama Antar Desa):
- ❖ Kegiatan pendukung yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kerjasama Antar Desa dalam Kawasan Perdesaan pada tanggal 15 Mei 2024 di Aula Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara.

3. Program Administrasi Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, dengan realisasi kinerja kegiatan sebagai berikut ;

- a. Jumlah desa yang difasilitasi pengelolaan administrasi desa sebanyak 266 desa (s.d Triwulan IV Tahun 2024);
- b. Jumlah Desa yang memiliki batas desa sebanyak 179 desa;
- c. Jumlah Desa yang memiliki BUMDes Aktif sebanyak 127 desa.

Output Sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan output Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa sebanyak 266 dokumen (s.d Triwulan IV Tahun 2024), dengan rincian :
 - 1) Jumlah desa yang terfasilitasi penyaluran DD dan ADD sebanyak 266 desa
 - 2) Jumlah fasilitasi Siskeudes (12 bulan) sebanyak Rp119.400.000,00;
 - 3) Jumlah pembayaran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa (Januari - Desember) sebesar Rp3.672.388.088,00.00.
- b) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, dengan output Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM Desa dan lembaga kerjasama antar desa sebanyak 20 dokumen (2 kali rakor BUMDesa/Ma dan 18 kali Monev BUMDesa Ma LKD).
 - ❖ Monev BUMDesa Ma LKD di 18 Kecamatan ;
 1. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec. Banjarnegara pada tanggal 19 Juli 2024;
 2. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec. Punggeln pada tanggal 25 Juli 2024;
 3. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Bawang pada tanggal 25 Juli 2024;
 4. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Batur pada tanggal 30 Juli 2024;
 5. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Wanayasa pada tanggal 30 Juli 2024;
 6. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Madukara pada tanggal 28 Agustus 2024;
 7. Monev BUMDesa Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Sigaluh pada tanggal 28 Agustus 2024;
 8. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Banjarmangu pada tanggal 25 September 2024;
 9. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Wanadadi pada tanggal 25 September 2024;

10. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Mandiraja pada tanggal 30 September 2024;
11. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Purwanegara pada tanggal 9 Oktober 2024;
12. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Purwareja Klampok pada tanggal 11 Oktober 2024;
13. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Pagentan pada tanggal 21 Oktober 2024;
14. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Karangkobar pada tanggal 22 Oktober 2024;
15. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Pejawaran pada tanggal 22 Oktober 2024;
16. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Susukan pada tanggal 23 Oktober 2024;
17. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Rakit pada tanggal 01 November 2024;
18. Monev BUMDes Ma LKD (Pasca PNPM) Kec.Pandanarum pada tanggal 04 November 2024;

❖ Rakor BUMDesa/Ma

1. Terlaksananya Rakor Monitoring dan Evaluasi BUM Desa Ma LKD Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 19 September 2024 di Rumah Makan Sari Rahayu - Banjarnegara;
2. Terlaksananya Rakor Monitoring dan Evaluasi BUM Desa Ma LKD Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 14 November 2024 di Aula BUMDesa Ma Artha Praja Dwipa LKD Kecamatan Karangkobar Kec. Banjarnegara.

c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan output Jumlah laporan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa sebanyak 57 laporan. Rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Terlaksananya penyerahan SK Kepala Desa terpilih Tahun 2024 bahwa nantinya 57 kades terpilih ini akan langsung dilantik tanpa ada pemilihan ulang pada 30 April 2026 pada tanggal 03 Mei 2024 di Rumah Makan Sari Rahayu 4.
2. Terlaksananya Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa se-Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 21 Juni Tahun 2024 di Pendopo Dipayudha Adigraha;

3. Terlaksananya pelantikan Kepala Desa yang terdapat kekosongan jabatan kepala desa karena meninggal dunia atau mengundurkan diri (Desa Panggisari Kec. Mandiraja, Desa Kalitengah Kec. Purwanegara, Desa Metawana Kec. Pagentan, Desa Balun Kec. Wanayasa, Desa Sumberejo Ke. Batur, Desa Dieng Kulon Kec. Batur) pd tgl 27 Agustus 2024 di Pendopo Dipayudha Adigraha;
 4. Terlaksananya pelantikan Kepala Desa terpilih Hasil Pemilihan Antar Waktu Desa Karangkemiri Kec. Wanadadi pd tgl 28 Agustus 2024 di Balai Desa Karangkemiri Pukul 09.00 WIB.
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dengan output Jumlah dokumen hasil pengelolaan aset desa sebanyak 7 Dokumen (Desa Duren Kec. Pagedongan, Desa Aribaya Kec. Pagentan, Twelagiri Kec. Pagedongan, Desa Larangan Kec. Pagentan, Desa Pandansari Kec. Wanayasa, Desa Clapar Kec. Madukara, Desa Danakerta Kec. Punggelan).
- e) Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan output Jumlah anggota BPD yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas sebanyak 266 orang pada tanggal 28-29 Agustus 2024 di Aula Sasana Abdi Praja Lantai 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- f) Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan output Jumlah desa yang difasilitasi dan penetapan dan penegasan batas desa sebanyak 29 desa. Dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Kecamatan Purwanegara (13 Desa)
 - ❖ Kecamatan Mandiraja (16 Desa)
- g) Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan output Jumlah dokumen hasil evaluasi perkembangan desa serta lomba desa dan kelurahan sebanyak 3 dokumen. Berdasarkan SK Bupati Nomor 400.10.2/670 Tahun 2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Juara Evaluasi Perkembangan Desa, sebagai berikut :
1. Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu;
 2. Desa Mantrianom Kec. Bawang;
 3. Desa Panggisari Kec. Mandiraja.
4. **Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat**
- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam perencanaan desa sebanyak 96,24 persen.
- ❖ Persentase desa yang memanfaatkan karya Teknologi Tepat Guna sebanyak 3,38 persen.

Output Sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Dewa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat dengan output Jumlah dokumen hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 6 dokumen :
 - 1) Dokumen Hibah kepada Karang Taruna Bayu Kirana Desa Parakan Kecamatan Purwanegara;
 - 2) Dokumen Hibah kepada Karang Taruna Pemuda Pemudi Kutayasa Bergerak (PPKB) Desa Kutayasa Kecamatan Bawang;
 - 3) Dokumen Hibah kepada Karang Taruna Tri Bhakti Desa Depok Kecamatan Bawang;
 - 4) Dokumen pembinaan penataan kelembagaan desa sebanyak 3 dokumen.
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output Jumlah lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sebanyak 19 lembaga;
- c) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan output Jumlah dokumen hasil fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga sebanyak 36 dokumen (36 desa binaan wilayah).

Kegiatan Pendukung sebagai berikut :

1. Pengajian rutin Az-Zahro pada tanggal 05 Januari 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
2. Latihan Paduan Suara tanggal 09, 16, 23 dan 30 Januari 2024 di Aula Gedung PKK Kab. Banjarnegara;
3. Penilaian Video Lomba Gelari Pelangi dan Senam CTPS dalam Rangka Puncak Peringatan HKG PKK Ke 52 Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Januari 2024;
4. Lomba Cerdas Cermat Kader PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 6-7 Maret 2024 di Gedung Monumen PKK Ungaran;
5. Pelaksanaan Lomba Paduan Suara PKK Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 pada tanggal 23 April 2024 di Gedung Gradhika Bhakti Praja Jl. Pahlawan No. 9 Semarang;
6. Rapat Pengurus Tim Penggerak PKK pada tanggal 13 Mei 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
7. Sosialisasi Gerakan Pengukuran LILA pada WUS pada tanggal 15 Mei 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
8. Pengajian rutin Az-Zahro pada tanggal 17 Mei 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
9. Bintek Penguatan dan Pengelolaan 10 Program Pokok PKK pada tanggal 17-19 Mei 2024;
10. Rapat Penyusunan Buku Laporan Akhir Masa Jabatan Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 22 Mei 2024 di Pringgitan Rumah Dinas Pj. Bupati Banjarnegara;
11. Rapat Rutin Pengurus TP PKK pada tanggal 31 Mei 2024 di Aula Gedung PKK Kab. Banjarnegara;
12. Menghadiri Acara Puncak HARGANAS Ke-31 Tahun 2024 pada tanggal 29 Juni 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang - Jawa Tengah.
13. Pengajian rutin Az-Zahro pada tanggal 28 Juni 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
14. Pengajian rutin Az-Zahro pada tanggal 06 September 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
15. Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) pada tanggal 24 Oktober 2024 di SDN 2 Pucang Kecamatan Bawang;
16. Terlaksananya evaluasi nominasi 10 Program Pokok PKK pada tanggal 18 Oktober 2024 di Desa Binorong Kecamatan Bawang;

17. Terlaksanananya evaluasi nominasi 10 Program Pokok PKK pada tanggal 21 Oktober 2024 di Desa Jenggawur Kecamatan Banjarmangu;
18. Terlaksanananya evaluasi nominasi 10 Program Pokok PKK pada tanggal 21 Oktober 2024 di Desa Merden Kecamatan Purwangeraga;
19. Terlaksanananya evaluasi nominasi 10 Program Pokok PKK pada tanggal 22 Oktober 2024 di Desa Kaliurip Kecamatan Madukara;
20. Pengajian rutin Az-Zahro pada tanggal 25 Oktober 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
21. Terlaksanananya evaluasi nominasi 10 Program Pokok PKK pada tanggal 29 Oktober 2024 di Desa Bedana Kecamatan Kalibening;
22. Pengajian rutin Az-Zarho pada tanggal 15 November 2024 di Aula Gedung TP PKK Kab. Banjarnegara;
23. Terpilihnya Juara Evaluasi 10 program Pokok PKK Tahun 2024 sebagai berikut :
 - ❖ Juara I TP PKK Desa Jenggawur Kec. Banjarmangu;
 - ❖ Juara II : TP PKK Desa Bedana Kec. Kalibening;
 - ❖ Juara III : TP PKK Desa Merden Kec. Purwanegara;
 - ❖ Juara Harapan I : TP PKK Desa Binorong Kec. Bawang;
 - ❖ Juara Harapan II : TP PKK Desa Kaliurip Kec. Madukara
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan output Jumlah karya yang memenuhi kriteria Teknologi Tepat Guna sebanyak 5 karya TTG.
Sebagai berikut :
 1. Peningkatan Efisiensi Penanaman Benih Wortel Melalui Penggunaan Alat Penanam Benih Wortel Hemat Energi;
 2. Inovasi Sawah Mini Metode Pertanian Lahan Sempit (MPLS) Mendukung Urban Farming di Kabupaten Banjarnegara;
 3. GAKURAMA "Galon Kuning Perangkap Hama";
 4. Perangkap Hama Kopi (PBKo) Hypothenemum Hampet Model FS-1;
 5. SAMARA (Sistem Aksi Makanan Rakyat).

Sasaran 3 : Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)

Pencapaian sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat diukur melalui 2 (dua) indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dan Angka Kelahiran

Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19).

1. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Angka Kelahiran Total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). TFR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.

Fertilitas atau angka kelahiran penduduk memiliki peranan dalam rangka pengambilan kebijakan pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga berkualitas. Pengambilan kebijakan kependudukan untuk saat ini terutama berkaitan dengan bonus demografi, Bonus demografi merupakan kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).

Indonesia telah mengalami bonus demografi sejak tahun 2015 dengan periode puncaknya diperkirakan terjadi pada periode 2020-2035. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, jumlah pada tengah tahun 2024 sebesar 1.068.347. dari jumlah tersebut, jumlah penduduk usia produktif sebanyak 734.984 atau 68,80 persen dan jumlah usia tidak produktif sebesar 333.363 atau 31,20 persen. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ketergantungan atau beban tanggungan sebesar 45,36 persen. Rasio 45,36 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 - 46 penduduk tidak produktif.

Periode bonus demografi dapat memiliki periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan. Apabila TFR bisa ditekan maka penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban bisa menurun atau dijaga agar tidak lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk produktif. Menurunnya TFR akan meningkatkan jumlah usia produktif karena mengurangi proporsi jumlah usia tidak produktif. Jumlah penduduk usia produktif yang besar dan berkualitas dapat berperan sebagai sumber tenaga kerja dan pelaku ekonomi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan-tujuan pembangunan.

Target Angka Kelahiran Total (TFR) Nasional Tahun 2024 sebesar 2,1, sedangkan target Provinsi Jawa Tengah sebesar provinsi sebesar 1,94 rata-

rata anak per wanita usia 15-49 tahun (Renstra BKKBN Tahun 2020-2024). Target dan realisasi serta capaian Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 3.19. Capaian Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Terkendalinya angka kelahiran total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,06	1,38	133,01	Sangat Tinggi

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2024

Berdasarkan hasil formulasi perhitungan Angka Kelahiran Total (TFR) dengan data dasar kependudukan tengah Tahun 2024 dari Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara serta angka kelahiran dari Dinas Kesehatan, realisasi TFR sebesar 1,38 rata-rata anak Wanita per usia 15-49 tahun. Angka Kelahiran Total 1,38 artinya rata-rata wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya melahirkan 1 - 2. Angka tersebut telah mencapai target dengan capaian 133,01 persen (sangat tinggi). Hal tersebut menunjukkan bahwa Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka pengendalian penduduk khususnya pengendalian kelahiran tepat sasaran dan tercapai dengan sangat baik. Angka Kelahiran Total (TFR) kabupaten merupakan komposit dari angka kelahiran total kecamatan. Capaian angka kelahiran total per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.20. Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Total	Jumlah wanita usia 15-49 tahun	TFR
1	2	3	4	5
1.	Susukan	574	16.289	1,25
2.	Purwareja Klampok	432	12.108	1,25
3.	Mandiraja	902	21.021	1,48
4.	Purwanegara	791	21.844	1,25
5.	B a w a n g	615	16.733	1,30
6.	Banjarnegara	547	18.383	1,06
7.	S i g a l u h	287	8.448	1,21
8.	Madukara	425	11.739	1,32
9.	Banjarmangu	501	11.888	1,49
10.	Wanadadi	368	8.911	1,44
11.	R a k i t	590	14.016	1,45
12.	Punggelan	865	23.434	1,26
13.	Karangobar	362	8.372	1,47
14.	Pagentan	465	10.277	1,54
15.	Pejawaran	532	11.763	1,57
16.	B a t u r	576	11.047	1,80
17.	Wanayasa	555	13.186	1,43
18.	Kalibening	537	12.182	1,48
19.	Pandanarum	272	5.981	1,50
20.	Pagedongan	505	11.484	1,53
	Kabupaten		269.146	1,38

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2024



Gambar 3.4. Angka Kelahiran Total (TFR) per Kecamatan Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran total tertinggi ada di Kecamatan Batur dengan angka 1,80 , dan angka kelahiran terendah 1,06 yaitu Kecamatan Banjarnegara. Adanya perbedaan angka kelahiran total di tiap kecamatan menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk tidak disamakan antar kecamatan. TFR yang berada di bawah target angka nasional 2,1 maka penduduk cenderung akan mengalami penurunan jumlah, Kondisi seperti ini apabila tidak dikendalikan akan menyebabkan pertumbuhan penduduk tidak seimbang. Untuk wilayah dengan TFR dibawah 2 maka arah program pengendalian penduduk adalah fokus pada peningkatan kualitas hidup, peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk masyarakat. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,108	1,94	1,75	1,65	1,38	1,76	Naik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2020-2024



Gambar 3.5 Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, angka kelahiran total terus menurun, hal ini berpengaruh baik untuk memperpanjang masa bonus demografi. Namun demikian, angka kelahiran total yang menurun terlalu cepat dapat mengganggu pertumbuhan penduduk seimbang. Pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas yang ditandai dengan menurunnya angka fertilitas (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1. Sehingga untuk selanjutnya penurunan selama kurun waktu 2020 sampai dengan 2024 bisa menjadi bahan evaluasi dalam penentuan kebijakan kependudukan berikutnya. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,02	1,38	131,68	Sangat Tinggi

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2024

Berdasarkan target di atas, realisasi target jangka menengah sudah tercapai, dengan capaian 131,68 persen. Perbandingan realisasi kabupaten dibandingkan target nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provnsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Realisasi Kabupaten
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka	2,1	1,94	1,38

Sumber Data : Renstra BKKBN, 2020-2024

Hal-hal yang mendukung pencapaian TFR

1. Capaian Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 sangat baik. Hal ini sangat berpengaruh pada perencanaan kehamilan lebih efektif sehingga berdampak dengan menurunnya kehamilan yang tidak diinginkan. Dengan jumlah dan jarak kelahiran yang terkendali dan terencana dapat mencegah kejadian stunting, mencegah kekurangan gizi pada anak, dan tumbuh kembang anak lebih terpantau sehingga meningkatkan derajat kesehatan anak Indonesia;
2. Capaian Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) tercapai dengan baik. Pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang lebih efektif dalam perencanaan pengaturan kehamilan serta memiliki jangka waktu yang lebih lama serta tingkat kegagalan yang lebih sedikit. Dengan mengatur kehamilan dan mewujudkan setiap kelahiran menjadi kelahiran yang terencana dapat meningkatkan peran keluarga dalam pengasuhan anak menjadi generasi unggul dan berdaya saing dimasa mendatang;
3. Kerjasama dan koordinasi yang sangat baik antar instansi, tokoh Masyarakat, petugas lini lapangan serta dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi sehingga Program Bangga Kencana bisa terlaksana dengan sangat baik.

Tantangan pencapaian TFR

1. Masih adanya pernikahan dini yang berpotensi pada terjadinya kehamilan remaja;
2. Masih adanya PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need), yang berpotensi pada terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan;
3. Penduduk tumbuh seimbang tercapai saat TFR 2,1 anak per perempuan dan *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1. Kabupaten Banjarnegara memiliki kecenderungan menurun dari tahun-tahun sebelumnya dengan capaian tahun 2024 sebesar 1,38 anak per Perempuan. Oleh karena itu, dengan TFR yang rendah tersebut, maka fokus pembangunan kependudukannya harus diarahkan pada peningkatan kualitas SDM dan peningkatan kualitas pelayanan dasar agar cita-cita untuk mencapai SDM Unggul Indonesia maju dapat benar-benar terwujud pada tahun 2045.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 3 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 13 orang terdiri dari Golongan IV (4 orang), Golongan II (1 orang)

serta dibantu oleh 6 orang PPPK dan 2 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 27 PNS, 6 PPPK yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparaturnya kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.346 orang Sub PPKBD dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.24. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Terkendalinya angka kelahiran total (TFR) Indikator : Angka Kelahiran Total	2,06	1,38	133,01	6.719.120.000	6.311.481.807	93,93	6,07

Sumber Data : Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 133,01, sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 93,93 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien dengan tingkat efisiensi anggaran 6,07. Anggaran sebagaimana tersebut terbagi pada dua program yaitu (1). Program Pengendalian Penduduk, dan (2). Program Pembinaan Keluarga Berencana. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.25. Capaian Indikator Program, Sasaran Strategis Ke-3 - TFR

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen	1	1	100,00
		Cakupan penyediaan data keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00

No	Program / Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
B.	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	77,09	76,75	99,56
		Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	14	4,77	165,93
		Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	%	100	137,07	137,07
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	33,08	36	108,83
		Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,94	3,6	148,13

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Tabel 3.26. Capaian Indikator Program yang Mendukung TFR Tahun 2020-2024

Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Dokumen	2	2	2	3	3
	Cakupan penyediaan data keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program Pembinaan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	%	80,24	76,09	77,20	81,24	76,75
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	NA	NA	NA	4,88	4,77
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan Masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	161,87	137,07
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	31,64	32,08	32,42	35,10	36
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	6,91	6,98	6,99	6,37	3,6

Sumber : Data Dispermades PPKB

Capaian Realisasi output sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 3 sebagai berikut :

a. Program Pengendalian Penduduk

- 1) Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.Kota, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu
 - ❖ Jumlah dokumen pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota sebanyak 12 dokumen (Januari - Desember 2024);
 - ❖ Persentase Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB sebanyak 61 persen;
 - ❖ Cakupan keluarga berisiko Stunting yang memperoleh pendampingan sejumlah 43.293 pendampingan.

Output sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga, dengan output Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga sebanyak 20 Laporan (Januari s.d Desember 2024)
- b) Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga, dengan output Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga sebanyak 20 Laporan (Januari s.d Desember 2024)
- c) Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan output Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB sebanyak 12 dokumen (Januari s.d Desember 2024);
- d) Sub Kegiatan Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB, dengan output Jumlah Laporan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB sebanyak 12 Dokumen (Januari - Desember 2024).

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Cakupan

wilayah yang terinterfensi program bangga kencana sebanyak 100 persen.

- a) Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK, dengan output Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPK sebanyak 2 laporan dengan rincian;
- ❖ Identifikasi dan Seleksi Kasus AKS I pada tanggal 8 Maret 2024 di Aula RSUD HJ. Anna Lasmanah Banjarnegara;
 - ❖ Kunjungan Lapangan AKS I pada tanggal 2-3 April 2024 di Puskesmas Purwanegara 1,2, Puskesmas Susukan 1 dan Puskesmas Madukara 1, Puskesmas Banjarnegara 2;
 - ❖ Terlaksananya Kajian Kasus dan Rekomendasi Tim Pakar AKS Tahap I Tahun 2024 pada tanggal 17 April 2024 di Aula RSUD HJ. Anna Lasmanah Banjarnegara;
 - ❖ Terlaksananya Diseminasi AKS Tahap I pada tanggal 07 Mei 2024 di Aula Sasana Karya Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - ❖ Terlaksananya Rencana Tindak Lanjut AKS Tahap I pada tanggal 1 Juni 2024 di Aula Sasana Karya Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - ❖ Identifikasi dan Selesi Kasus AKS II pada tanggal 1 Juli 2024 di Aula PKK kabupaten Banjarnegara;
 - ❖ Kunjungan Lapangan AKS II pada tanggal 10-13 September 2024 di Desa Nagasari dan Sokaraja Kec.Pagentan (10 September 2024), Desa Rejasari Kec. Banjarmangu (11 September 2024), Desa Tepuran Kec. Wanayasa (12 September 2024), Desa Kaliwinasuh Kec. Klampok, (13 September 2024);
 - ❖ Terlaksananya Kajian Kasus dan Rekomendasi Tim Pakar AKS Tahap II Tahun 2024 pada tanggal 25 September 2024 di Aula RSUD HJ. Anna Lasmanah Banjarnegara;
 - ❖ Terlaksananya Diseminasi AKS Tahap II pada tanggal 29 Oktober 2024 di Aula Sasana Karya Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - ❖ Terlaksananya Rencana Tindak Lanjut AKS Tahap II pada tanggal 04 November 2024 di Aula Sasana Karya Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

- b) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK, dengan output Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sebanyak 20 laporan (Januari s.d Desember 2024);
- c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan output Jumlah laporan mekanisme operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui Rapat Koordinasi Kecamatan Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) sebanyak 200 laporan;
- d) Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan output Jumlah dokumen promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang sebanyak 8 dokumen. Dengan rincian di bawah ini :
 - 1. Jumlah cetak kalender sebanyak 200 buah;
 - 2. Jumlah cetak baliho sebanyak 50 buah;
 - 3. Jumlah spanduk standart yang dicetak sebanyak 100 meter;
 - 4. Jumlah kain batik yang diadakan sebanyak 70 buah;
 - 5. Jumlah payung yang diadakan sebanyak 84 buah.;
 - 6. Jumlah kaos olahraga yang diadakan sebanyak 500 buah;
 - 7. Jumlah termos plastik yang diadakan seanyak 100 buah;
 - 8. Jumlah spot radio sebanyak 400 kali siar.
- e) Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan output Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal sebanyak 16 dokumen (Pandanarum, Kalibening, Pagentan (2), DispermadesPPKB (2), Karangobar (3), Banjarmangu (1), Purwareja Klampok (1), Mandiraja (1), Kalibening (1), Pandanarum (1), Banjarnegara (2)).

- f) Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, dengan output Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan mitra kerja sebanyak 6 organisasi. Dengan rincian sebagai berikut ;
- Terlaksananya rapat koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Kamis, 2 Mei 2024 tempat Aula Sasana Karya Praja Lt 2 Gedung Setda Kabupaten Banjarnegara, peserta 90 orang;
 - Terlaksananya rapat persiapan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Seri II Tahun 2024, Kamis, 13 Juni 2024 tempat Aula RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara peserta 40 orang;
 - Terlaksananya Paparan Praktik Baik Audit Kasus Stunting Seri II Tingkat Nasional Tahun 2024 untuk 5 PASTI (AKSI PASTI), Rabu 19 Juni 2024 tempat Command Centre Lt 2 Gedung Setda kabupaten Banjarnegara, peserta 50 orang;
 - Terlaksananya Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke 31 Tahun 2024 tingkat Kabupaten Banjarnegara, hari Jumat, 5 Juli 2024, tempat Alun – alun Banjarnegara, jumlah peserta 750 orang;
 - Terlaksananya Rapat Koordinasi persiapan penilaian TPK Hebat seri III tahun 2024, hari Selasa, 23 Juli 2024 tempat Aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 19 orang;
 - Terlaksananya Coaching pertama Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2024, hari Rabu, 24 Juli 2024, tempat Aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 15 orang;
 - Terlaksananya Coaching kedua Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2024, hari Selasa, 30 Juli 2024, tempat Aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 30 orang;
 - Terlaksananya kegiatan Gladi bersih Paparan TPK Hebat Seri III Tahun 2024 hari Senin, 5 Agustus 2024, tempat

Command Centre Setda Kabupaten Banjarnegara jumlah peserta 20 Orang;

- Terlaksananya Kegiatan Paparan Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2024 tingkat Nasional, Selasa, 6 Agustus 2024, tnpat Command Centre Lt 2 Gedung Setda Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 50 orang;
- Terlaksananya Advokasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, hari Rabu, 25 September 2024, tempat Pendopo Dipayuda Adhigara, jumlah peserta 140 orang;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi bagi PPKBD Tingkat Kabupaten Banjarnegara hari Rabu, 16 Oktober 2024, tempat Sasana Bhakti Praja Setda Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 105 orang;
- Terlaksananya Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Banjarnegara hari Selasa, 29 Oktober 2024, tempat Sasana Bhakti Praja Lt 1 Setda Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 90 orang;
- Terlaksananya Rapat Koordinasi dalam rangka penanganan kasus stunting di desa bagi PPKBD Tingkat Kabupaten Banjarnegara hari Selasa, 5 November 2024, tempat Aula PKK Kabupaten Banjarnegara, jumlah peserta 80 orang;
- Terlaksananya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Susukan, hari Rabu, 20 November 2024, tempat Aula Kecamatan Susukan, jumlah peserta 55 orang;
- Terlaksananya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Purwareja Klampok, hari Kamis, 21 November 2024, tempat Aula Kecamatan Purwareja Klampok, jumlah peserta 35 orang;
- Terlaksananya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Mandiraja, hari Jumat, 22 November 2024, tempat Aula Kecamatan Mandiraja, jumlah peserta 60 orang;
- Terlaksananya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Purwanegara, hari Senin, 25 November 2024, tempat Aula Kecamatan Purwanegara, jumlah peserta 50 orang;

- Terlaksanannya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Banjarnegara, hari Selasa, 26 November 2024, tempat Aula Balai KB Kecamatan Banjarnegara, jumlah peserta 50 orang;
 - Terlaksanannya Rapat Penanganan Penurunan Kasus Stunting Tingkat Kecamatan Sigaluh, hari Kamis, 28 November 2024, tempat Aula Kecamatan Sigaluh, jumlah peserta 50 orang;
 - Terlaksananya Kegiatan Sosialisasi Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Banjarnegara bagi Remaja, hari Jumat, 6 Desember 2024 tempat SMA Negeri 1 Banjarnegara, jumlah peserta 132 orang.
- 2) Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk sebanyak 100 persen.
- a) Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan output Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) sebanyak 17.115 orang, dengan rincian sebagai berikut :
- ❖ Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) BOKB sebanyak 16.680 orang;
 - ❖ Jumlah kader yang mengikuti penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (APBD II) sebanyak 435 orang.
- 3) Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan realisasi indikator kegiatan sebagai berikut
- ❖ Jumlah fasilitas kesehatan yang mendapatkan distribusi alokon sebanyak 56 faskes (Triwulan IV Tahun 2024);
 - ❖ Jumlah PUS yang terlayani KB MKJP sebanyak 6.204 Orang;
 - ❖ Jumlah PUS yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB 170.628 Orang
 - ❖ Jumlah fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya yang mendapatkan pembinaan pelayanan KB sebanyak 56 Faskes.

Output sub kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

- a) Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan output Jumlah laporan pengendalian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 56 Laporan (56 Faskes selama 12 bulan)
- b) Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP), dengan output Jumlah orang yang mengikutikesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebanyak 6.204 Orang (IUD : 1.386, Implant : 4.622, MOW : 191, MOP : 5).

Didukung kegiatan lini lapangan sebagai berikut

- ❖ Rapat Koordinasi Pelayanan KB Tahun 2024 pada tanggal 5 Februari 2024 di Gedung PKK Kab. Banjarnegara (35 peserta);
- ❖ Pencanaan dan Rapat Koordinasi Pelayanan KB Bhakti Sosial Muslimat NU dan Aisyiyah Tahun 2024 pada tanggal 12 Februari 2024 di Aula Setda Lantai II Kab. Banjarnegara (60 peserta);
- ❖ Sosialisasi Kontrasepsi Mantap Tahun 2024 pada tanggal 29 April 2024 di Aula Gedung PKK Lt.II Kab. Banjarnegara (60 peserta);
- ❖ Peningkatan Kapasitas Pengurus Fatayat NU pada tanggal 30 April 2024 di gedung PKK Lt. 2 (30 peserta);
- ❖ Peningkatan Kapasitas KB Pasca Persalinan bagi PPKBD pada tanggal 30 Mei 2024 di Aula Kedung PKK Lt.II Kab. Banjarnegara (60 peserta);
- ❖ Pemenang Lomba Akseptor KB Lestari Tahun 2024 (BA Lomba 26 Juni 2024) :
 1. Paryan al Slamet / Marsini (Desa Kalilunjar Kec. Banjarmangu);
 2. Kardi / Ani Setiowati (Desa Beji Kec. Pandanarum);
 3. A.Samhan / Tubayinah (Kel. Sokanandi RT 1 RW 2 Kec. Banjarnegara)

- ❖ Rapat Koordinasi Pelayanan KB Bangga Kencana Kesehatan (Kesatuan Gerak PKK dan TMKK) Tahun 2024 tanggal 08 November 2024 di Aula Sasana Bhakti Praja Setda Kab. Banjarnegara.

c) Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, dengan output yaitu Jumlah laporan dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP sebanyak 2 laporan dengan rincian :

1. An Rajem RT 01/05 Petir- Purwanegara sebesar Rp1.500.000,00);
2. An. Ny. Siti Khomsiyah RT 002 RW 001 Desa Wanakarsa Kecamatan Wanadadi (Komplikasi MOW) sebesar Rp1.500.000.

Didukung kegiatan lapangan :

- ❖ Rapat Tim Jaga Mutu pada tanggal 28 Agustus 2024 di Aula Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara;
- ❖ Rapat Pembelajaran Kegagalan dan Komplikasi Penggunaan MKJP pada tanggal 12 September 2024 di Aula Sasana Abdi Praja Lt. III Setda Kab. Banjarnegara

d) Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan output Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya sebanyak 56 Laporan s.d Triwulan IV Tahun 2024).

Didukung kegiatan lini lapangan sebagai berikut :

- ❖ Rapat Evaluasi Pelayanan KB Tahun 2024 pada tanggal 25 April 2024 di Aula PKK Kab. Banjarnegara;
- ❖ Terlaksananya Lomba Puskesmas MKJP Terbaik Tahun 2024 (25 Juni 2024) :
 1. Terbaik I : Puskesmas Pandanarum
 2. Terbaik II : Puskesmas Batur I
 3. Terbaik III Puskesmas Bawang I
- ❖ Rapat Evaluasi Pelayanan KB Semester II Tahun 2024 pada tanggal 26 November 2024 di Aula PKK Kab. Banjarnegara.

e) Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, dengan output Jumlah orang yang mengikuti

promosi dan konseling KB pasca persalinan dan pasca keguguran sebanyak 170.628 orang.

Didukung kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Workshop KB Pasca Persalinan pada tanggal 13 Juni 2024 di Aula Gedung PKK Lantai II Kab. Banjarnegara (59 peserta);
- ❖ Workshop KB Pasca Persalinan pada tanggal 04 Juli 2024 di Aula Gedung PKK Lantai II Kab. Banjarnegara (60 peserta);
- ❖ Peningkatan Kapasitas KB Pasca Salin bagi TPK pada tanggal 14 dan 15 Oktober 2024 di Aula Gedung PKK Lantai II Kab. Banjarnegara (108 peserta).

4) Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan realisasi indikator kegiatan yaitu Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB sebanyak 5 Organisasi.

- a) Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, dengan output Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB sebanyak 1 dokumen.
- b) Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan output Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB sebanyak 54 kampung KB (598 kali).

2. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) perempuan usia 15-19 merupakan Angka kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun per 1000 wanita dalam satu tahun tertentu. Angka ini dapat digunakan untuk memetakan fertilitas umur muda yang dapat menjadi peringatan dini terhadap ancaman tingginya fertilitas secara umum. Fertilitas pada usia muda akan mempengaruhi

potensi melahirkan sampai dengan masa reproduksinya berakhir. Jika di usia muda (masa reproduksi awal) perempuan sudah hamil dan melahirkan berarti akan memiliki potensi untuk hamil dan melahirkan anak lebih banyak lagi sampai dengan akhir usia reproduksinya. Oleh karena itu, menurunkan fertilitas remaja (ASFR 15–19 tahun) akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka fertilitas secara umum (TFR). Realisasi Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2024 ditunjukkan sebagai berikut :

Tabel 3.27. Capaian Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	1. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	11,52	9,51	117,45	Sangat Tinggi

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2024

Berdasarkan pengukuran 9,51 dari target 11,52 kelahiran per 1.000 wanita usia 15-19 tahun dengan capaian 117,45 persen. Hal tersebut menunjukkan upaya-upaya untuk menurunkan angka ASFR Remaja berhasil dengan sangat baik. Capaian ASFR Remaja (usia 15-19) per kecamatan sebagai berikut :

Tabel 3.28. ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah kelahiran remaja	Jumlah wanita usia remaja (15-19 tahun)	ASFR 15-19
1	2	3	4	5
1.	Susukan	10	2.333	4,29
2.	Purwareja Klampok	2	1.724	1,16
3.	Mandiraja	15	2.862	5,24
4.	Purwanegara	25	2.810	8,89
5.	B a w a n g	21	2.233	9,40
6.	Banjarnegara	12	2.666	4,50
7.	S i g a l u h	10	1.221	8,19
8.	Madukara	13	1.613	8,06
9.	Banjarmangu	17	1.670	10,18
10.	Wanadadi	9	1.232	7,30
11.	R a k i t	20	1.887	10,60
12.	Punggelan	33	3.198	10,32
13.	Karangobar	13	1.128	11,52
14.	Pagentan	12	1.314	9.13
15.	Pejawaran	39	1.569	24,86
16.	B a t u r	21	1.501	13,98
17.	Wanayasa	46	1.742	26,41
18.	Kalibening	10	1.601	6,25
19.	Pandanarum	7	722	9,69
20.	Pagedongan	13	1.550	8,39
	JUMLAH		36.577	9,51

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2024



Gambar 3.6. ASFR (usia 15-19) per Kecamatan Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, ASFR remaja tertinggi sebagian besar terdapat di kecamatan wilayah atas / dataran tinggi dengan angka tertinggi pada Kecamatan Wanayasa sebesar 26,41. Angka ASFR terendah ada di Kecamatan Purwareja Klampok sebesar 1, 16

Tabel 3.29. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	33,49	22,66	23,24	11,52	9,51	20,08	Naik

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2020-2024



Gambar 3.7. Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, capaian angka kelahiran remaja memiliki kecenderungan yang menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini

menunjukkan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan tepat sasaran dan berhasil dengan sangat baik. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.30. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Perangkat Daerah dibandingkan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Nilai	11,50	9,51	117,30	Sangat Tinggi

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB, 2020-2024

Berdasarkan hasil pengukuran angka kelahiran remaja dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian tersebut sudah memenuhi dengan capaian 117,30 persen. Hal tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan kependudukan khususnya remaja di tahun berikutnya.

Tabel 3.31. Realisasi Indikator Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) Kabupaten dibandingkan Target Nasional dan Target Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target Nasional	Target Provinsi	Realisasi Kabupaten
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Angka	18	19	9,51

Sumber Data : Renstra BKKBN, 2020-2024

Hal-hal yang mendukung pencapaian ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

1. Penguatan pendidikan reproduksi remaja melalui ajang Duta GENRE. GenRe (Generasi Berencana) adalah program yang bertujuan mengedukasi dan memberikan informasi kepada remaja Indonesia agar menjadi generasi yang punya perencanaan kehidupan yang matang. Program GenRe merupakan wadah untuk mengembangkan karakter bangsa karena mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pranikah dan Napza guna menjadi remaja tangguh dan dapat berkontribusi dalam pembangunan ;

2. Penguatan edukasi melalui PIK Remaja. PIK Remaja adalah suatu wadah kegiatan program PKBR (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja) yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga. Saat ini jumlah PIK remaja sudah mencapai 44 kelompok di 20 kecamatan;
3. Penguatan Pendidikan Reproduksi Remaja melalui Kegiatan Pramuka Saka Kencana melalui pembinaan dan pertemuan rutin. Pramuka Saka Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat, dalam bidang keluarga sejahtera dan pengembangan kependudukan. Sarana dan wahana guna memupuk, mengembangkan, membina dan mengarahkan minat dan bakat generasi muda dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).

Tantangan pencapaian ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

1. Masa remaja adalah masa yang paling rentan terhadap pengaruh yang terjadi di lingkungannya. Pengaruh tersebut akan dengan sangat cepat mempengaruhi remaja, apalagi disertai dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat. Sehingga memerlukan pendampingan terutama terhadap hal-hal yang berpengaruh negatif;
2. Belum optimalnya sinergitas implementasi antar program dan kegiatan tentang Remaja yang dikembangkan bersama antar perangkat daerah;
3. Luasnya jangkauan pembinaan dibandingkan dengan jumlah tenaga di lini lapangan sehingga belum optimalnya terhadap pembinaan ketahanan remaja terutama remaja putus sekolah serta remaja disabilitas.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 2 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 13 orang terdiri dari Golongan IV (4 orang), Golongan II (1orang) serta dibantu oleh 6 orang PPPK dan 2 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas dengan optimal. Selain itu dalam pelaksanaan pergerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 27 PNS, 6 PPPK yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.346 orang Sub PPKBD dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.32. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-3, Indikator ASFR Remaja Usia 15-19 Tahun

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Indikator : Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	11,52	9,51	117,45	5.377.600.000	5.200.566.200	96,71	3,29

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 117,45 sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 96,71 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien dengan tingkat efisien anggaran 3,29. Anggaran sebagaimana tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.33. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-3

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	76,01	80,69	106,16
		Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	61,52	73,14	118,89
		Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	36,72	43,7	119,01

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
		Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	50,74	63,62	125,38
		Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	15,00	28,06	187,07

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Tabel 3.34. Capaian Indikator Program yang Mendukung ASFR 15-19 Tahun Tahun 2020-2024

Program	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	%	NA	NA	NA	86,59	80,69
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	%	NA	NA	NA	82,17	73,14
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	%	NA	NA	NA	84,10	43,7
	Cakupan PUS Peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB Mandiri	%	NA	NA	NA	88,92	63,62
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	%	NA	NA	NA	25,12	28,06

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada Tahun 2024 dapat tercapai lebih dari 100 persen pada setiap indikatornya, akan tetapi apabila dibandingkan dengan Tahun 2023 terjadi penurunan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan system pelaporan, pada tahun 2023 masih dapat menggunakan pelaporan data secara manual dan Tahun 2024 wajib menggunakan pelaporan melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (SIGA) BKKBN.

Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 3 sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan indikator capaian kegiatan sebagai berikut :

- 1) Jumlah kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebanyak 32 Kelompok
- 2) Jumlah pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan sebanyak 5 Kelompok

Capaian output sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 32 Unit oleh CV. Smart Consulting Indonesia (BAST Nomor : 900/BAST/PPK/2024 tanggal 26 Juli 2024);
- 2) Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah kader yang mengikuti orientasi.pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) sebanyak 25 Orang dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kelas Materi pada tanggal 22 Maret 2024 di Aula Dispermades PPKB (semua peserta);
 - b) Kelas Materi dan Kelas Praktek tanggal 25-26 Maret 2024 (Kec.Punggelan dan Kec. Kalibening), 25-26 Maret 2024 (Kec. Pagedongan, Pagentan dan Purwareja Klampok)
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan output Jumlah laporan hasil Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) sebanyak 32 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

PPKS Kecamatan Banjarnegara	: 8 laporan
PPKS Kecamatan Pagedongan	: 8 laporan
PPKS Kecamatan Wanadadi	: 8 laporan
PPKS Kecamatan Rakit	: 8 laporan

- 4) Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga, dengan output Jumlah laporan hasil promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga) sebanyak 12 laporan, yang terdiri dari 4 laporan kegiatan Saka kencana, 4 laporan kegiatan PIK R, 2 laporan kegiatan Genre, 1 laporan lomba Genre dan 1 laporan lomba PIK R. Dengan rincian sebagai berikut :

❖ Saka Kencana

- Tanggal 13 Januari 2024 (Sosialisasi Saka Kencana) jumlah peserta 20 yang terdiri dari Saka Kencana Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara bertempat di aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.
- Tanggal 25 Mei 2024 (Pengambilan Badge Saka kencana) jumlah peserta 20 yang terdiri dari anggota Saka Kencana baru bertempat di Curug pitu Sigaluh.
- Tanggal 29 Juni 2024 (Musyawarah dan Makrab) jumlah peserta 20 dan bertempat di aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.
- Tanggal 20 September 2024 (Pengambilan Badge Saka Kencana Susulan) jumlah peserta 20 bertempat di aula Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara.

❖ PIK R

- Tanggal 30 Mei 2024 (Sosialisasi dan Pembentukan PIK R) jumlah peserta 60 yang terdiri dari siswa SMP Islam Plus Bilingual School (IPBS) tunas Bangsa Banjarnegara bertempat di SMP Islam Plus Bilingual School (IPBS) tunas Bangsa Banjarnegara.
- Tanggal 1 Agustus 2024 (Edukasi Gizi bagi Remaja) jumlah Peserta 60 yang terdiri dari Duta Genre Kecamatan terpilih Tahun 2024 dan bertempat di aula Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara.
- Tanggal 28 Agustus 2024 (Bimbingan Teknis Pelayanan Sebaya) jumlah peserta 60 yang terdiri dari beberapa PIK R jalur Pendidikan yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

- Tanggal 30 Oktober 2024 (Program Pelatihan PIK R Gabungan) jumlah peserta 60 yang terdiri dari 6 besar juara Apresiasi lomba PIK R Tingkat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024.
- Tanggal 16 Oktober 2024 (Apresiasi Lomba PIK R Tingkat Kabupaten Banjarnegara) jumlah peserta 40 yang terdiri dari SMA N 1 Banjarnegara, SMA N 1 Karangobar, SMK N 2 Bawang, SMK 1 Mandiraja, MAN 1 Banjarnegara dan MAN 2 Banjarnegara. Dengan hasil kejuaraan :
 - Juara I : PIK R Pratama Kaizen. MAN 2 Banjarnegara
 - Juara II : PIK R Abhipraya, SMAN 1 Karangobar
 - Juara III : PIK R Baswara, SMAN 1 Banjarnegara
 - Juara Harapan 1 : PIK R Mansa. MAN 1 Banjarnegara
 - Juara Harapan 2 : PIK R Gemilang, SMKN 2 Bawang
 - Juara Harapan 3 : PIK R Intera, SMKN 1 Mandiraja
- ❖ Kegiatan Genre
 - Tanggal 4 Maret 2024 (Temu Kerja Daerah Forum Genre) jumlah peserta 40 yang terdiri dari Forum Genre Kabupaten Banjarnegara dan beberapa PIK R yang ada di Kabupaten Banjarnegara bertempat di aula Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara.
 - Tanggal 27 Juni 2024 (Pembekalan Apresiasi Duta Genre) jumlah peserta 40 yang terdiri dari Duta Genre Kecamatan tahun 2024 aula Gedung PKK Kabupaten Banjarnegara.
 - Tanggal 7 Agustus 2024 (Apresiasi Lomba Duta Genre Tahun 2024) jumlah peserta 42 yang terdiri dari Duta Genre Kecamatan terpilih Tahun 2024 bertempat di Gedung Balai Budaya Kabupaten Banjarnegara. Dengan hasil kejuaraan :
 - Putra
 - Juara I : Firdaus Affandi Wibowo
 - Juara II : Alfian Adibi
 - Juara III : Arsyid Fattah Umara
 - Juara Harapan 1 : Binar Aira Qolby
 - Juara Harapan 2 : Damar Syarif Pambudi
 - Juara Harapan 3 : Dwi Nur Mughni
 - Putri
 - Juara I : Arsil Sarotun Khasanah

Juara II : Stifany Reza Albertya
 Juara III : Tringkas Wulan Malfiyani
 Juara Harapan 1 : Farah Biananda Sahara
 Juara Harapan 2 : Puspita Anggraeni
 Juara Harapan 3 : Aeneas Kanazora Adlai

b. Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. dengan indikator capaian kegiatan :

Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang berperan serta dalam Pembangunan Keluarga sebanyak 784 organisasi :

Capaian output sub kegiatan yang mendukung Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pemantauan dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salih/Kelahiran, Baduta/Balita) dengan output Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) sebanyak 10 laporan.
- 2) Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) , dengan output Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan sejumlah 43.293 pendampingan.

Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat merupakan salah satu sasaran utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat. Survey Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif

atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali.

Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dispermades PPKB dengan membentuk Tim yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas. Sasaran survey Dispermades PPKB diantaranya pelayanan, yaitu pada masyarakat penerima layanan diantaranya fasilitasi Dana Desa, pelayanan fasilitasi bantuan keuangan kepada desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, fasilitasi pengembangan ekonomi pedesaan serta koordinasi/konsultasi pelayanan Keluarga Berencana. Melalui survey tersebut diharapkan akan mendorong partisipasi masyarakat pengguna layanan dalam memberikan penilaian kinerja layanan serta mendorong Dispermades PPKB untuk terus meningkatkan layanan.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.35. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) pertanyaan sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat. Capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.36. Capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status Capaian
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya kualitas layanan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	84	84,57	100,68	Sangat Tinggi

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan SKM Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84,57 telah mencapai target dengan kategori Sangat Tinggi serta capaian sebesar 100,68 persen. Selanjutnya Dispermades PPKB untuk terus melaksanakan peningkatan pelayanan publik agar pelayanan prima kepada Masyarakat segera terwujud. Capaian nilai masing-masing unsur ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.37. Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	2	3
1	Kesesuaian Persyaratan	3,257
2	Prosedur Pelayanan	3,307
3	Kecepatan Pelayanan	3,168
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3,525
5	Kesesuaian Pelayanan	3,287
6	Kompetensi Petugas	3,396
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,386
8	Kualitas Sarana dan Prasarana	3,277
9	Penanganan Pengaduan	3,842

Sumber : : Laporan Pelaksanaan SKM Dispermades PPKB Tahun 2024

Keseluruhan unsur tercapai penilaian yang baik, namun demikian perlu untuk melaksanakan evaluasi secara berkala guna perbaikan dan peningkatan layanan. Nilai unsur layanan terendah yaitu pada unsur waktu pelayanan, sehingga bisa menjadi prioritas evaluasi peningkatan layanan publik. Realisasi Indikator Indeks Masyarakat Tahun 2020-2024 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.38. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Rata Rata	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8		
Meningkatnya kualitas layanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,38	81,61	82,87	83,53	84,57	84,59	Naik

Sumber Data : Laporan Pelaksanaan SKM, 2020-2024



Gambar 3.8. Realisasi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024

Berdasarkan data di atas, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tertinggi dicapai pada tahun 2020 sebesar 90,38. Kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2021 menjadi 81,61. Pada tahun 2022 - 2024 terjadi peningkatan tetapi belum lebih baik dari tahun 2020. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Dispermades PPKB terhadap kualitas pelayanan untuk melakukan upaya-upaya yang serius terhadap peningkatan pelayanan kepada Masyarakat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Meningkatnya komitmen serta kualitas pelayanan aparatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik penyelenggaraan urusan Dispermades PPKB sesuai dengan standar pelayanan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Evaluasi, pembinaan dan penguatan komitmen terkait pelayanan publik terhadap jajaran aparatatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan terhadap sarana prasarana pelayanan publik.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Pencapaian sasaran strategis ke 4 didukung oleh sumberdaya manusia dan anggaran. Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 18 orang terdiri dari Golongan IV (2 orang), Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 3 orang, SMU : 2 orang), Golongan II (2 orang) serta dibantu oleh 2 Orang PPPK dan 6 orang THL. Keseluruhan potensi sumber daya manusia tersebut tersebar pada dua bidang dan masing-masing telah melaksanakan tugas

dengan optimal. Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya anggaran digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.39. Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Sasaran Strategis Ke-4, Indikator Indeks Kepuasan masyarakat

Sasaran Strategis/ Indikator	Indikator			Anggaran (Rp)			Tingkat Efisiensi %
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Sasaran : Meningkatnya kualitas layanan publik Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat	84	84,57	100.68	7.067.260.269	6.895.125.744,	97,22	2,78

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Berdasarkan data di atas, penggunaan sumberdaya sudah efisien karena persentase penggunaan anggaran lebih sedikit dari capaian kinerja. Capaian kinerja sebesar 100,68, Sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 97,22 sehingga penggunaan sumberdaya sudah efisien dengan efisiensi anggaran sebesar 2,78. Anggaran sebagaimana tersebut didukung oleh satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten. Capaian indikator program dan kegiatan yang mendukung sebagai berikut :

Tabel 3.40. Capaian Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan Sasaran Strategis Ke-4

No	Program	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
A.	Program Penunjang usutan Pemerintah Daerah Kabupaten	Persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah yang dipenuhi	Persen	100,00	100,00	100,00

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024

Capaian realisasi kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung sasaran ke 4 sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase terlayannya administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 100 persen.
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 40 Orang untuk 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
 - 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan outputJumlah Dokumen Penatausahaan dan

- Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase terlayannya administrasi umum perangkat daerah sebanyak 100 persen.
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan sebanyak 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
 - c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan, Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipenuhi sebanyak 100 persen.
 - 1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan sebanyak 34 unit (Alat pendingin - 8 buah, Laptop - 10 buah, printer - 9 buah, Televisi - 1 buah, Penghancur Kertas - 1 buah, LCD - 1 buah, Kamera - 1 buah, Sound Sistem - 1 buah, PC - 1 buah, Scanner - 1 buah).
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan, Persentase terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebanyak 100 persen.
 - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan sebanyak 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
 - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan sebanyak 12 bulan (Januari s.d Desember 2024).
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan realisasi kinerja kegiatan Persentase BMD penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sebanyak 100 persen.

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya sebanyak 11 unit.
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 22 unit.
3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi sebanyak 22 unit.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 tanggal 20 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.291.060.645,00. Kemudian anggaran Dispermades PPKB mengalami satu kali perubahan anggaran Tahun 2024. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA P) tanggal 13 September 2024, anggaran naik menjadi Rp25.293.932.869,00 atau naik sebesar Rp2.872.244,00.

Anggaran Tahun 2024 lebih tinggi dibanding tahun 2023 sebesar Rp24.878.171.906,00, naik sebesar Rp 415.760.963,00. Kenaikan anggaran tersebut juga didukung oleh kenaikan anggaran yang bersumber dari DAU terutama untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa serentak tahun 2024 pada 57 desa serta Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2024 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp13.677.212.869,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp11.616.720.000.

Anggaran yang bersumber dana dari DAK Sub Bidang KB menurun dari Rp12.013.537.000 menjadi Rp11.616.720.000. Rincian DAK Sub Bidang KB Tahun 2024 yaitu DAK Non Fisik (BOKB) sebesar 11.216.670.000,00 sedangkan dari DAK Fisik sebesar Rp399.990.000,00. Secara keseluruhan anggaran DAK mengalami penurunan sebesar Rp316.817.000,00.

Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp24.420.970.389,00 (96,55%) yang terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp13.471.679.344,00, DAK Non Fisik

sebesar Rp10.637.019.622,00, DAK Fisik Penugasan sebesar Rp311.644.423,00. Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana Tahun 2023-2024 sebagai berikut :

Tabel 3.41. Realisasi anggaran berdasarkan sumber dana Tahun 2023-2024

Tahun	Pagu Anggaran				Realisasi			
	APBD II	BOKB	DAK Fisik	Total	APBD II	BOKB	DAK Fisik	Total
2023	12.864.634.906	10.955.336.000	1.058.201.000	24.878.171.906	12.360.956.424	10.096.749.767	1.043.639.532	23.501.345.543
2024	13.677.272.869	11.216.670.000	399.990.000	25.293.932.869	13.471.679.344	10.637.019.622	311.644.423	24.420.343.389

Pengukuran penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran (pagu dalam DPA terakhir). Pengukuran Penyerapan Anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021

Keterangan :

- P : Penyerapan Anggaran
- RA : Realisasi Anggaran
- AA : Alokasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2024 sebagai berikut :

$$P = \frac{24.420.343.389}{25.293.932.869} \times 100\%$$

$$P = 96,55\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, penyerapan anggaran Dispermades PPKB sebesar 96,55 persen. Penyerapan tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 94,70 persen. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.42. Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2024

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realiasasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.092.260.269,00	6.895.125.744,00	97,22
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000,00	24.290.000,00	97,16
	1. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	24.290.000,00	97,16
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.020.474.969,00	4.911.509.107,00	97,83
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.972.309.969,00	4.863.344.107,00	97,81
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	48.165.000,00	48.165.000,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	769.380.800,00	740.511.526,00	96,25
	1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	22.354.000,00	89,42
	2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	744.380.800,00	718.157.526,00	96,48
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	277.861.500,00	266.903.000,00	96,06
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	277.861.500,00	266.903.000,00	96,06
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	741.543.000,00	697.479.111,00	94,06
	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.600.000,00	65.273.988,00	84,12
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	663.943.000,00	632.205.123,00	95,22
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	258.000.000,00	254.433.000,00	98,62
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	130.000.000,00	127.311.500,00	97,93
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dn Bangunan Lainnya	98.000.000,00	97.127.000,00	99,11
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000,00	29.994.500,00	99,98
B.	Program Penataan Desa	144.702.600,00	143.676.200,00	99,29
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	144.702.600,00	143.676.200,00	99,29
	1. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	144.702.600,00	143.676.200,00	99,29
C.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	20.000.000,00	19.743.500,00	98,72
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	20.000.000,00	19.743.500,00	98,72
	1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	20.000.000,00	19.743.500,00	98,72
D.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	5.223.250.000,00	5.160.352.338,00	98,80
7.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.223.250.000,00	5.160.352.338,00	98,80
	1. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.900.000.000,00	3.870.757.388,00	99,25
	2. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	19.000.000,00	18.868.000,00	99,31
	3. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Kepala Desa	660.000.000,00	632.848.600,00	95,89
	4. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	15.000.000,00	14.849.500,00	99,00
	5. Pembinaan Peningkata Kapasitas Anggota BPD	40.000.000,00	36.120.800,00	90,30
	6. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	57.325.000,00	56.281.650,00	98,18
	7. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	531.925.000,00	530.626.400,00	99,76

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
E.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	717.000.000,00	689.397.600,00	96,15
8.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	717.000.000,00	689.397.600,00	96,15
	1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RT, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	150.000.000,00	139.424.500,00	92,95
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	235.000.000,00	224.851.900,00	95,69
	3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	32.000.000,00	31.564.200,00	98,64
	4. Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	300.000.000,00	293.547.000,00	97,85
F.	Program Pengendalian Penduduk	472.000.000,00	450.890.053,00	95,53
9.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	472.000.000,00	450.890.053,00	95,53
	1. Sub Kgiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	60.000.000,00	59.020.678,00	98,37
	2. Sub Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan Data Keluarga	234.000.000,00	228.360.000,00	97,59
	3. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	168.000.000,00	154.093.135,00	91,72
	4. Sub Kegiatan Perumusan Parameter Pengendalian Penduduk dan KB	10.000.000,00	9.416.240,00	94,16
G.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.247.120.000,00	5.860.591.754,00	93,81
10.	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.740.000.000,00	1.695.706.655,00	97,45
	1. Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	80.000.000,00	78.197.700,00	97,75
	2. Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	1.010.000.000,00	984.846.955,00	97,51
	3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui	300.000.000,00	297.053.000,00	97,02

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
	4. Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	118.000.000,00	116.245.000,00	98,51
	5. Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	32.000.000,00	32.000.000,00	100,00
	6. Sub Kegiatan Advokasi Program Program Bangga Kencana kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	200.000.000,00	187.364.000,00	93,68
11.	Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	884.000.000,00	883.466.000,00	99,95
	1. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	884.000.000,00	883.566.000,00	99,95
12.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Keutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.770.470.000,00	2.439.843.099,00	88,07
	1. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	450.390.000,00	354.059.795,00	78,61
	2. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk panjang (MKJP)	2.182.080.00,00	1.967.199.304,00	90,15
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	30.000.000,00	20.172.000,00	67,24
	4. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	68.000.000,00	59.592.500,00	87,64
	5. Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	40.000.000,00	38.819.500,00	97,05
13.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	852.650.000,00	841.476.000,00	98,69
	1. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	3.810.000,00	3.640.000,00	95,54
	2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	848.840.000,00	834.836.000,00	98,70
H.	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	5.377.600.000,00	5.200.566.300,00	96,71
14.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	438.400.000,00	431.886.200,00	98,51
	1. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi	80.000.000,00	78.035.000,00	97,54

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
2.	Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	38.400.000,00	36.480.000,00	95,00
3.	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor/UPPKA)	300.000.000,00	297.920.000,00	99,31
4.	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Akseptor/UPPKA)	20.000.000,00	19.451.200,00	97,26
15.	Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peranserta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.939.200.000,00	4.768.680.000,00	96,55
1.	Sub Kegiatan Pemantauan dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	2.352.000.000,00	2.234.400.000,00	95,00
2.	Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	2.587.200.000,00	2.534.280.000,00	97,95
Jumlah		25.293.932.869,00	24.420.343.389,00	96,55

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2024

Secara umum pengelolaan anggaran Tahun 2024 telah terlaksana dengan sangat baik. Pada tahun 2024, dari Pagu Anggaran Rp25.293.932.869,00 realisasi belanja sebesar Rp24.420.343.389,00 atau (96,55%), sehingga terdapat efisiensi belanja sebesar Rp873.589.480,00,00 (3,45%). Secara persentase, realisasi tahun 2024 (96,55%) meningkat dari tahun 2023 (94,47), dengan kenaikan sebesar 1,85 persen. Dengan rincian sisa anggaran sebagai berikut :

1. Sisa belanja anggaran APBD II sebesar Rp205.593.525,00. Sebagian besar karena sisa anggaran pada gaji ASN sebesar Rp 108.965.862,00, Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor sebesar Rp31.737.877,00, dan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp26.223.274,00;

- 2. Sisa belanja pengadaan DAK Non Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp579.650.378,00. Sebagian besar sisanya merupakan sisa anggaran pada menu operasional pelayanan KB khususnya pelayanan KB MKJP sebesar Rp228.439.696,00. Sisa anggaran pada pelayanan KB MKJP karena dari 6.414 akseptor yang dianggarkan hanya terserap 6.204 akseptor. Serta operasional pendampingan TPK sebesar Rp170.520.000,00;
- 3. Sisa belanja pengadaan DAK Fisik pembangunan Gudang alat dan obat kontrasepsi sebesar Rp88.345.577,00.

Selain penyerapan anggaran, pengukuran lainnya yaitu terhadap konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Tingkat konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan setiap bulan. Sedangkan konsistensi pada suatu bulan merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Tabel penghitungan konsistensi penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.43. Rekapitulasi Penghitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKBTahun 2024

No	Bulan	Rencana Penarikan Dana (RPD) (Rp)	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	RPD Kumulatif (Rp)	RA Kumulatif (Rp)	Tingkat Konsistensi per bulan (%)	Rata-rata Konsistensi pada bulan ... (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Januari	1.386.829.402	312.760.009	1.386.829.402	312.760.009	22,55	22,55
2.	Februari	3.128.792.402	1.581.911.421	4.515.621.804	1.894.671.430	41,96	32,26
3.	Maret	3.278.308.602	575.383.567	7.793.930.406	2.470.054.997	31,69	32,07
4.	April	4.079.746.404	1.556.797.852	11.873.676.810	4.026.852.849	33,91	32,53
5.	Mei	2.302.992.802	4.679.470.138	14.176.669.612	8.706.322.987	61,41	38,31
6.	Juni	2.221.798.442	2.530.531.690	16.398.468.054	11.236.854.677	68,52	43,34
7.	Juli	1.755.488.994	2.706.517.085	18.153.957.048	13.943.371.762	76,81	48,12
8.	Agustus	3.240.548.500	2.015.354.255	21.394.505.548	15.958.726.017	74,59	51,43
9.	September	1.740.151.982	2.954.800.831	23.134.657.048	18.913.526.848	81,75	54,80
10.	Oktober	1.106.146.289	2.162.582.849	24.240.803.819	21.076.109.697	86,94	58,02
11.	November	921.442.800	1.814.453.261	25.162.246.619	22.890.562.958	90,97	61,01
12.	Desember	131.686.250	1.529.780.431	25.293.932.869	24.420.343.389	96,55	63,97

Sumber : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2024

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember sebesar 63,97 persen. Angka konsistensi tersebut meningkat dibandingkan tahun 2023 sebesar 62,27 dan tahun 2022 sebesar 60,65. Berdasarkan Tingkat konsistensi penyerapan anggaran tersebut, perencanaan penyerapan anggaran masih belum konsisten dibandingkan jadwal realisasi anggaran atau penyerapan anggaran banyak yang tertunda. Perkembangan Pagu Anggaran /Alokasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2024 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :

Tabel 3.44. Perkembangan Pagu Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2024

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisai (Rp)	Status Capaian	% Rata-Rata konsistensi penyerapan
1	2	3	4	5	6
1.	2019	11.147.189.500	9.378.802.101	84,14	
2.	2020	12.777.539.747	11.584.452.228	90,66	
3.	2021	18.230.368.900	16.826.252.606	92,30	
4.	2022	22.523.948.490	21.375.703.760	94,90	60,65
5.	2023	24.878.171.906	23.501.345.543	94,47	62,27
6.	2024	25.293.392.869	24.420.343.389	96,45	63,97

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2019-2024



Gambar 3.9. Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2024

Berdasarkan gambar di atas, alokasi anggaran Dispermades PPKB semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dimana terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran Sosial Jaminan Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya anggaran tersebut melekat pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Banjarnegara. Serta meningkatnya alokasi anggaran DAK Sub Bidang KB dari tahun sebelumnya sehingga memiliki kontribusi dalam peningkatan anggaran.

Beberapa permasalahan penyerapan anggaran Tahun 2024 diantaranya sebagai berikut :

1. Pada awal tahun untuk mengajukan pertanggungjawaban Ganti Uang (GU), maka perangkat daerah terlebih dahulu harus menyelesaikan laporan keuangan dan laporan Barang Milik Daerah (BMD) tahun sebelumnya. Proses penyusunan yaitu bertepatan pada awal tahun anggaran, sehingga proses pengajuan Ganti Uang bergantung pada kecepatan petugas dalam penyusunan laporan;
2. Disisi lain proses pembelanjaan anggaran harus terlebih dahulu menyusun Rencana Umum Pengadaan (RUP), karena seluruh kegiatan belanja harus tercantum dalam RUP Perangkat Daerah. Proses penyusunan RUP pada awal tahun atau bulan

Januari tahun berjalan. Sehingga belanja perangkat daerah juga bergantung salah satunya pada penyusunan RUP;

3. Setiap Perangkat Daerah yang akan mengajukan Ganti Uang (GU Pertama) harus sudah menyelesaikan Laporan Keuangan dan Laporan Barang BMD TA sebelumnya dibuktikan dengan Berita Rekonsiliasi Aset BPPKAD Kab. Banjarnegara. Sehingga belanja perangkat daerah khususnya bulan januari juga bergantung salah satunya pada penyusunan laporan Keuangan dan Laporan Barang BMD;
4. Kurangnya komitmen pengelola kegiatan terhadap rencana anggaran kas atau rencana penarikan dana yang telah disusun sebagaimana perencanaan anggaran, sehingga menyebabkan keterlambatan dan tertundanya penyerapan anggaran;
5. Beberapa anggaran, penyerapannya tergantung pada kondisi lapangan terutama fasilitasi pelayanan KB beserta pendukungnya. Diantaranya menu Pelayanan KB MKJP dan jasa penyediaan ayoman kegagalan MKJP. Tahun 2024 tersedia alokasi pelayanan untuk 6.416 akseptor, sedangkan realisasi 6.204 sehingga masih tersisa 212 alokasi pelayanan akseptor KB. Sedangkan jasa ayoman tersedia untuk 6 klaim, hanya ada pengajuan 2 klaim kegagalan KB, sehingga masih ada 4 jasa ayoman kegagalan KB yang tidak terpakai. Sisa pelayanan KB maupun jasa ayoman kegagalan KB yang tidak terserap akan menjadi sisa anggaran;
6. Adanya sisa negosiasi belanja, maka tidak memungkinkan anggaran terserap 100 persen. Sisa negosiasi terbesar yaitu pada belanja DAK Fisik (pembangunan Gudang Alokon) dengan sisa negosiasi sebesar Rp. 88.345.577,00

Beberapa upaya Dispermades PPKB dalam mengefektifkan penggunaan anggaran diantaranya :

1. Melaksanakan pencermatan pada penyusunan rencana anggaran kas agar tidak terjadi kendala/permasalahan ketersediaan anggaran pada saat pelaksanaan;
2. Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring serta pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan sesuai dengan jadwal perencanaan;
3. Melaksanakan pemetaan pada pengadaan barang dan jasa terutama yang bersumber dana dari DAK Fisik agar bisa terlaksana tepat waktu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan DAK Fisik bahwa batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap II yaitu pada tanggal 21 Juli tahun berjalan;
4. Melaksanakan pemetaan dan pergeseran anggaran terhadap sisa lebih anggaran sedini mungkin untuk dialokasikan pada capaian kinerja lainnya yang masih terdapat kekurangan dalam rangka optimalisasi pencapaian target kegiatan dan keuangan;

5. Monitoring dan pemetaan pencairan keuangan terutama menjelang akhir tahun untuk mengakomodir kebutuhan dan ketersediaan anggaran agar penyerapan anggaran optimal;
6. Meningkatkan komitmen pengelola kegiatan agar pelaksanaan sebagaimana ketentuan jadwal yang telah direncanakan sehingga berdampak pada tertundanya penyerapan anggaran.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan sasaran kinerja utama, Dispermades PPKB juga berpartisipasi aktif dalam program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran nasional. Beberapa prestasi yang diperoleh pada Tahun 2024 diantaranya :

1. Juara I kategori Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Jawa Tengah atas Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu;
2. Juara I Desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Tahun 2024 Tingkat Nasional di regional II tahun 2024;
3. Nominator Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional II Tahun 2024.
4. Terbaik Penyaluran Dana Desa Semester I Tahun 2024
5. Juara II Kabupaten/Kota Terbaik dalam Implementasi Audit Kasus Stunting untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri I dan II Tahun 2024 Tingkat Nasional;
6. Terbaik I TPK Penyaji Analisa dan tata laksana Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah pada Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2024 ‘Sukses Menyusui dan KB Pasca Persalinan, Yes’ atas TPK Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara – Provinsi Jawa Tengah;
7. Pembina Tim Pendamping Keluarga (TPK) Terbaik atas TPK Kelurahan Argasoka Kec.Banjarnegara
8. Kategori Video Favorit Tik Tok Challenge “Remaja Cegah Stunting” Tingkat Nasional 2024, Penyelenggara BKKBN atas Tim PIK-R SMAN 1 Banjarnegara (PIK-R BASWARA);
9. Predikat Tertinggi Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 47 kategori Sangat Tinggi Tingkat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
10. OPD Dinas/Badan Terbaik dalam Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
11. Kategori Sangat Baik sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024 dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan nilai 4,07;
12. Juara III Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam rangka HUT Ke 79 kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024;
13. Peringkat VI Penghargaan Pengawasan Kearsipan Daerah dengan nilai Baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas amanat pelaksanaan kinerja dan anggaran. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi permasalahan, kegagalan serta faktor-faktor yang mendukung untuk perbaikan serta upaya meningkatkan kinerja. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun Anggaran 2024, ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja. Rata-rata capaian indikator sebesar 132,65 persen. Empat indikator memiliki capaian di atas 100 persen yaitu (1) Jumlah Desa berstatus mandiri, (2) Angka Kelahiran Total (TFR), (3) Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19) dan (4) Indeks Kepuasan Masyarakat. Sedangkan satu indikator lainnya tercapai kurang dari 100 persen meskipun masih dalam kategori sangat tinggi yaitu indikator Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Terkait dengan indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah terdapat beberapa upaya perbaikan yang dapat dilakukan ditahun-tahun berikutnya, agar pada tahun berikutnya target dapat tercapai. Upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyelarasan sasaran dan indikator pada dokumen perencanaan berdasarkan berita acara hasil reviu penyelarasan dokumen perencanaan;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen seluruh jajaran aparat Dispermades PPKB dalam budaya berorientasi kinerja;
3. Melaksanakan monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran secara berkala dan lebih tepat waktu;
4. Memanfaatkan teknologi infomasi dalam proses akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
5. Melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi dan perbaikan manajemen kinerja yang berkelanjutan;

Pencapaian target kinerja dari 4 (empat) sasaran yang diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja didukung anggaran sebesar Rp25.293.932.869,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp24.420.343.389,00 atau (96,55%), sehingga terdapat efisensi belanja sebesar Rp873.589.480,00 (3,45%).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara ini disusun. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat dan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Saran dan masukan dari berbagai pihak semoga bisa menjadi perbaikan kinerja dan motivasi pada periode yang akan datang.

Banjarnegara, 28 Februari 2025

KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA



HENDRO CAHYONO, SE., MSi.
Pemuda Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan S. Parman No. 7 Telepon (0286) 594442 Faksimile (0286) 594442
Website : dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id, email : dispermadesppkb.bna@banjarnegarakab.go.id
BANJARNEGARA Kode Pos 53412

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRO CAHYONO, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Nama : MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

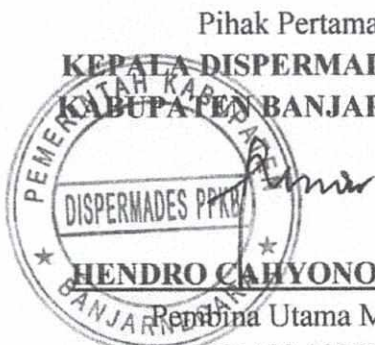
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
Pj. BUPATI BANJARNEGARA

MUHAMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
			Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	77,5%	77,5%
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa berstatus mandiri	4 Desa	6 Desa
3.	Terkendalinya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,06 Angka	2,06 Angka
		Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,06 Angka	11,52 Angka
4.	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	84	84

Program		Anggaran		Keterangan
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
1. Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Rp7.211.108.645	Rp7.092.260.269	APBD Kab.
2. Program Penataan Desa		Rp110.000.000	Rp144.702.600	APBD Kab.
3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Desa		Rp20.000.000	Rp20.000.000	APBD Kab.
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa		Rp5.136.232.000	Rp5.223.250.000	APBD Kab.
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		Rp717.000.000	Rp717.000.000	APBD Kab.

Program	Anggaran		Keterangan
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
6. Program Pengendalian Penduduk	Rp472.000.000	Rp472.000.000	APBD Kab. Dan DAK
7. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp6.247.120.000	Rp6.247.120.000	APBD Kab. Dan DAK
8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp5.377.600.000	Rp5.377.600.000	APBD Kab. Dan DAK
Jumlah	Rp25.291.060.645	Rp25.293.932.869	

Banjarnegara, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua
PJ. BUPATI BANJARNEGARA

MUHAMMAD MASROFI, S.Sos, M.Si

Pihak Pertama
KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681130 199703 1 007



Piagam Penghargaan Nominator Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional Regional II Tahun 2024, Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmasin



Piagam Penghargaan Juara I Desa Teladan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (PKAD) Tahun 2024 Tingkat Nasional di Regional II tahun 2024, Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmasin



Piagam Penghargaan Juara I Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi tahun 2024, Desa Sijenggung Kecamatan Banjarmangu



Piagam Penghargaan Terbaik Penyaluran Dana Desa Semester I Tahun 2024



Piagam Penghargaan Juara II Kabupaten/Kota Terbaik dalam Implementasi Audit Kasus Stunting untuk 5 PASTI (AKSI PASTI) Seri I dan II Tahun 2024 Tingkat Nasional





Piagam Penghargaan Juara Terbaik I TPK Penyaji Analisa dan tata laksana Kasus Pembelajaran Berbasis Masalah pada Kelas TPK Hebat Seri III Tahun 2024 ‘Sukses Menyusui dan KB Pasca Persalinan, Yes’ atas TPK Kelurahan Argasoka Kecamatan Banjarnegara



Piagam Penghargaan Pembina Tim Pendamping Keluarga (TPK) Terbaik atas TPK Kelurahan Argasoka Kec.Banjarnegara



Kategori Video Favorit Tik Tok Challenge “Remaja Cegah Stunting” Tingkat Nasional 2024, Penyelenggara BKKBN atas Tim PIK-R SMAN 1 Banjarnegara (PIK-R BASWARA)



Piagam Penghargaan OPD Dinas/Badan Terbaik dalam Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara



Piagam Penghargaan Kategori Sangat Baik sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2024



Piagam Penghargaan Peringkat 1 pada Penilaian Kematangan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024



Piagam Penghargaan Juara III Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) dalam rangka HUT Ke 79 kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024



Piagam Penghargaan Terbaik 6 pada Audit Pengawasan Kearsipan Internal Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024



TMMD Sengkuyung I Desa Sinduaji Kec. Pandanarum Tahun 2024



TMMD Reguler Desa Sijenggung Kec. Banjarmasin Tahun 2024



TMMD Sengkuyung III Desa Wanayasa Kec. Wanayasa Tahun 2024



TMMD Sengkuyung IV Desa Prendengan Kec.Banjarmangu Tahun 2024



Kunjungan Pada kelompok BKB Desa Purwasaba Kec. Mandiraja Oleh Tim Penggerak PKK Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Desa Binaan Tahun 2024



Kunjungan Pada kelompok BKR Oleh Tim Penggerak PKK Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Desa Binaan Tahun 2024



Kunjungan Pada kelompok BKL Desa Binorong Kec. Bawang Oleh Tim Penggerak PKK Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Desa Binaan Tahun 2024



Penyerahan SK Perpanjangan Jabatan Kepala Desa Tahun 2024



Pemilihan Duta Generasi Berencana Tahun 2024



Pemilihan PIK Remaja Unggulan Tingkat Kabupaten Banjarnegara



Sosialisasi Pusat Informasi dan Konseling remaja (PIK-R) Tahun 2024 di SMAN 1 Banjarnegara



Pembinaan Saka Kencana Tahun 2024



Pelayanan KB Hari Kontrasepsi Sedunia dan TMKK Kecamatan Purwanegara Tahun 2024



Wisuda Sekolah Lansia Istiqomah Kelurahan Kutabanjarnegara Kec.Banjarnegara Tahun 2024



Wisuda Sekolah Lansia Ridaka Desa Kalibening Kecamatan Kalibening Tahun 2024



Stock Opname Alat dan Obat Kontrasepsi Semester II Tahun 2024



Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2024